

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 20, 21, DAN 30 NOVEMBER 2017



**TENTANG
RAPERDA
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Hari : SENIN
Tanggal : 20 November 2017
Waktu : 10.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2018;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 39 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dengan keadaan sehat wal-afiat. Adapun Rapat Paripurna ini merupakan Rapat Paripurna pertama dari empat Rapat Paripurna yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam rapat

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Amanat Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa ***“Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ”.***

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 39 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan ***“Bismillahirrohmanirrohim”*** tepat pukul 11.55 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 sangat erat hubungannya dengan KUA-PPAS Tahun 2018, yang mengacu pada Undang-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal ini tercermin dalam rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan, baik menyangkut kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua yang merupakan acara pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu *"Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018"*.

Kepada Saudara Bupati Rembang, waktu dan tempat dipersilahkan.

**== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2018 ==**

➤ *(Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran*

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Dengan telah disampaikannya penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018, maka selesailah acara rapat paripurna pertama ini.

Setelah rapat paripurna ini, akan dilaksanakan rapat fraksi-fraksi dalam menyusun pemandangan umum terhadap Raperda, yang selanjutnya disampaikan pada rapat paripurna kedua, pada hari ini juga Senin tanggal 20 November 2017.

Akhirnya, dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*" tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,

SEKRETARIS, */*



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan tentang Raperda
APBD Tahun Anggaran 2018;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLFH. B.A	Anggota	22	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
	FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARJ, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
	FRAKSI HARAPAN		
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PAPAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Kejelasan :

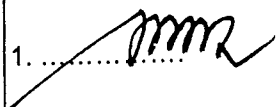
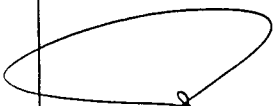
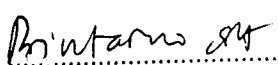
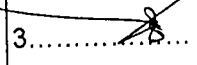
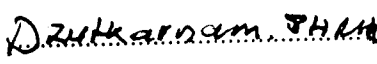
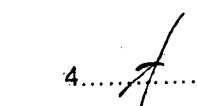
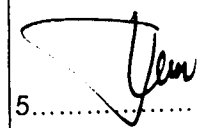
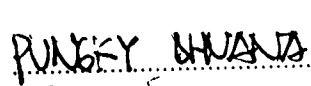
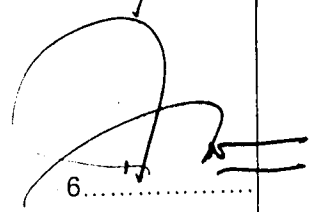
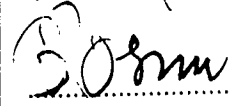
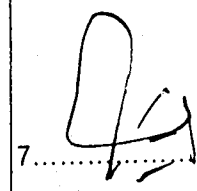
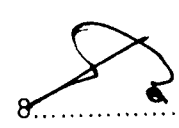
1 : ljin

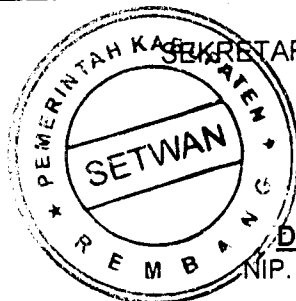
2 S : Sakit

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA,

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
 PUKUL : 10.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si

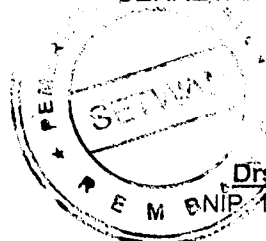
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
 PUKUL : 10.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Edy KESNANTO	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOFFIT	2
3	CAMAT SUMBER	KAM DANI	3
4	CAMAT SULANG	Samet Haryanto	4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN	U. WIPOTO	6
7	CAMAT GUNEM	Eti Winarno	7
8	CAMAT SALE	Kurni	8
9	CAMAT LASEM	PEPIA	9
10	CAMAT PANCUR	Ikhant	10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE	HARYANTO	12
13	CAMAT KRAGAN	Prato R	13
14	CAMAT SARANG	MUTAQIN	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



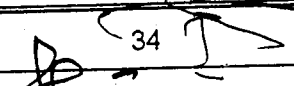
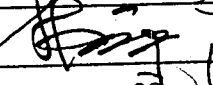
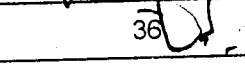
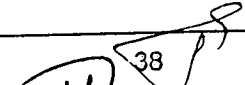
[Signature]

Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (!) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	A. WUCUFI	Asst I	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	MASHADI	Kabag	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Kukuh	Ka. Bag Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Wicak	Kabag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laksono	Kabag	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	Mubtin	Kabon	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Don Widyum		18
19	DINAGOSP2KB	Seo Widyum		19
20	B K D	Rizki Teguh Wibowo		20
21	B P B D	Purwati		21
22	DPU TATA RUANG	SUTIHARPO	KA	22
23	DPKP/ DINPERKIM	Joestichan	Bat. Ka	23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Syafii	Ka Din	24
25	DINDIKPORA			25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Akhmad	KA DINAS	26
27	DINTANPAN	Suramin	Kadin	27
28	DINLUTKAN	Suparman	Kadin	28
29	DINKOMINFO	Wartono	Ka Din	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<i>Sulwis B</i>	<i>R</i>	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	<i>Didik S</i>	<i>Ka TU</i>	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	<i>Widyawati</i>	<i>SAKT</i>	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	<i>Soetomo</i>	<i>PCT RU</i>	38 
39	SATPOL PP	<i>H. WALLYO</i>	<i>Sat pol</i>	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK			66

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA	Mulyanti		84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masidi	Reporter	86
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR	Munir		90
91	PERDA	H. MULLIAH		91
92	MINIMIR RAKYAT	STARYO		92
93	FICS	A. Watanah		93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



**PENGANTAR
NOTA KEUANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM, Rekan Media dan tamu undangan yang berbahagia.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kita dapat menghadiri rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Legislatif atas berbagai masukan yang telah diberikan selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 dan akhirnya telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Insya Allah, apa yang kita usahakan bersama ini bermanfaat bagi pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Tujuan utama Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.

Pembahasan RAPBD ini diharapkan tetap dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai dengan kebijakan pembangunan tahun 2018 yang bertemakan "**Penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandirian Daerah** " dengan fokus pembangunan yaitu :

- Kemudahan investasi dan optimalisasi potensi serta update data pelaporan investasi yang ada di Kabupaten Rembang;
- Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pasar tradisional dan UMKM, optimalisasi peran koperasi, serta pengembangan sentra sentra ekonomi kreatif;
- pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Rembang;
- Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Dasar (SD)
2. Dana BOS
3. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
4. Pembangunan jalan dan jembatan
5. Rehabilitasi jaringan irigasi
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi masyarakat miskin
7. Penataan lingkungan permukiman
8. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani
9. Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan

RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan komitmen dan ketaatan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan telah memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2018 Pendapatan Daerah direncanakan mencapai Rp.1,77 Triliun. Jumlah ini naik 0,76% dari target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2017 sebesar Rp.1,76 Triliun.

Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1,77 Triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.271 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp1,09 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.408 milyar.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan yang menjadi kewenangan daerah dan

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Dalam RAPBD Tahun Anggaran 2018 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berupaya terus meningkatkan kualitas belanja daerah secara menyeluruh. Total belanja daerah sebesar Rp.1,86 Trilliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.1,07 Trilliun dan Belanja Langsung sebesar Rp.790 Milyar.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk **Bidang Pendidikan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan **20% lebih** dari belanja daerah. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2018 Belanja Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga) sebesar Rp.534 Milyar, atau **28,60%** dari total Belanja Daerah.

Demikian juga untuk **Bidang Kesehatan**, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal **10%** dari total belanja APBD diluar gaji. Dalam RAPBD Kabupaten Rembang TA. 2018 Belanja Bidang

3. Pembiayaan Daerah :

Pengeluaran pembiayaan dalam RAPBD TA 2018 untuk penyertaan modal Daerah sebesar Rp.1 Milyar, pada PT. Rembang Migas Energi.

Berikut kami sampaikan ringkasan Rancangan PERDA tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 :

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN DAERAH	1.777.121.343.655
Pendapatan Asli Daerah	271.502.204.655
Pendapatan Pajak Daerah	94.514.000.000
Hasil Retribusi Daerah	22.928.499.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.257.000.000
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.802.705.655
Dana Perimbangan	1.097.531.488.000
Dana Transfer Umum	815.321.417.000
Dana Transfer Khusus	282.210.071.000
Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	408.087.651.000
Hibah	57.432.800.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.000.000.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228.728.361.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.926.490.000
BELANJA	1.869.225.723.684
Belanja Tidak Langsung	1.078.343.599.500
Belanja Pegawai	668.770.123.000
Belanja Hibah	56.510.600.000
Belanja Bantuan Sosial	8.935.000.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.455.961.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	336.671.915.500
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
Belanja Langsung	790.882.124.184
Belanja Pegawai	149.543.818.200

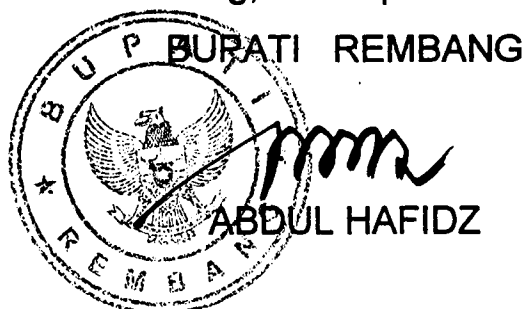
Uraian	Jumlah
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	93.104.380.029
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	93.104.380.029
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	92.104.380.029
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, Saya berharap untuk segera dibahas secara mendalam, obyektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Nopember 2017





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018

**Hari : SENIN
Tanggal : 20 November 2017
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang**

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang**
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka**
- III. ACARA RAPAT :**

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 37 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: - orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum melangkah pada acara pokok, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan anugerah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat kembali bertemu untuk mengikuti Rapat Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Rembang dalam pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan keabsahan rapat paripurna kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada rapat

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 37 orang.

Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna kedua ini telah terpenuhi.

Untuk itu dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 14.40 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang tanggal 17 November 2017, yang menjadi agenda pokok dalam Rapat Paripurna Kedua membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ini, adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Untuk selengkapnya, akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Untuk kelancarannya, kepada anggota yang ditunjuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Zaimul Umam NS |
| 2. Fraksi Demokrat | : Hj. Hikmah Purnamawati |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Ilyas |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : Nanik Sri Sundari |
| 5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | : Puji Santoso,S.P.M.H. |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : Gatot Paeran, S.H.M.Si. |
| 7. Fraksi Harapan | : Nur Jannah |

Secara berurutan dimulai Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

➤ ***(Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 terlampir)***

Terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya dalam menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

rapat paripurna kedua ini. Untuk rapat paripurna ketiga dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi dilaksanakan besok pagi Selasa tanggal 21 November 2017.

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan saya, di dalam memimpin rapat.

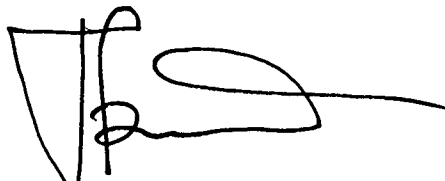
Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin” tepat pukul 15.25 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS *✓*



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap
Raperda APBD Tahun Anggaran 2018;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
PUKUL : 13.00 WIB

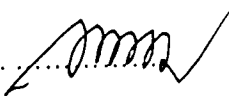
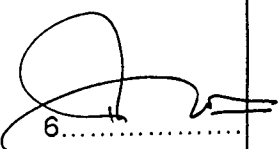
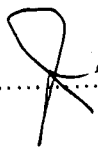
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	H. VAS	Anggota	21	

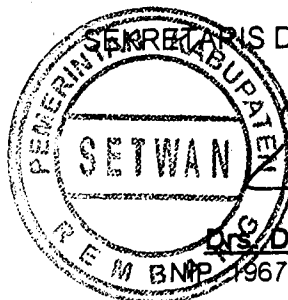
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	IASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
	FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.II.	Anggota	41
	FRAKSI HARAPAN		
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

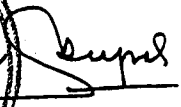
Keterangan :

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG
APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
 PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	<u>Dzulkaarnain S.H., M.H.</u>	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6	<u>RNGRY SHANAS</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<u>Mal. Iwani</u>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 



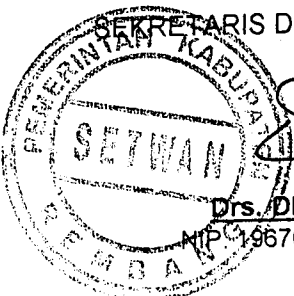
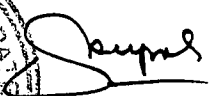

Drs. DRUPODO, M.Si
 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI ATAS RAPERDA
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
 PUKUL : 13.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG		1
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER	KAM DANI	3
4	CAMAT SULANG	Slamet Haryanto	4
5	CAMAT BULU	Taswadi	5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kunad	8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

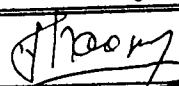
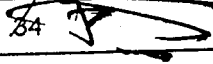
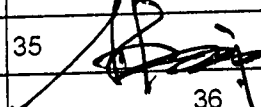
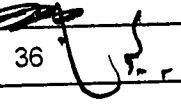
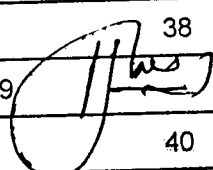
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

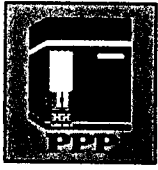


Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI ATAS RAPERDA TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SENIN, 20 NOVEMBER 2017
PUKUL : 13.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	MASSTADI	Kabang	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Sulistiyowah	Ka Sub bag	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Iwan H	Kabang	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Sugiyarti	Kabang.	14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	Muhammad	Kabang	16
17	INSPEKTORAT	FAH RUDIN		17
18	BAPPEDA	Dhodyun		18
19	DINSOSP2KB	Dwi Irt		19
20	B K D			20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG	MUTHUKARTO	KA	22
23	DPKP/ DINPERKIM	Jaennarni	ka. ka.	23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Hapri	ka. ka.	24
25	DINDIKPORA	A. Patih Kusuma	Kabid	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Akhmad NUDIN	KADINAS	26
27	DINTANPAN	Suratman		27
28	DINLUKIN	Suparman	ka. ka.	28

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Djoharim		33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sunardi	K	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Diketo S	Ka Tu	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Wenapara	Bur.	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	WALUYO	Kasat	39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2018

Selasa , 20 Nopember 2017

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Asyrofil Ambiyai walmursalin, Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

=> Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Kepala Pengadilan dan Kepala Kejaksaan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris daerah, Asisten sekda, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Kepala Badan , dan Sdr Camat se-kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan...
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita, tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW., yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya sampai di yaumul qiyamah.

Hadirin.., Sidang Dewan yang kami hormati...,

Mengawali penyampaian pemandangan umum ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, meskipun harus tetap bekerja keras untuk menyelesaikan kegiatan APBD tahun 2017, dengan sisa waktu efektif yang tinggal 36 hari lagi harus berahir . Dan khususnya kepada TAPD, kami juga memberikan apresiasi yang tinggi, atas kinerjanya, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2018 ini, dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan, untuk segera dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang terhormat.....,

Selanjutnya, setelah mendengarkan paparan penjelasan sdr Bupati tentang RAPBD 2018 , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , pada kesempatan yang baik ini, memberikan beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain sebagai berikut :

1. Terkait usulan kenaikan TPP , kami Fraksi Partai Perstuan Pembangunan, mengapresiasi dan mendukung usulan yang diajukan oleh sdr. Bupati, sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan, juga pemicu kinerja pegawai, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, agar sdr.

Bupati dapat menciptakan sistim pengendalian dan penilaian aparatur Pemkab Rembang, agar makna peningkatan kinerja efektif dan lebih optimal, sehingga manfaat TPP benar-benar sesuai harapan tepat sasaran.

2. Terkait dengan penganggaran dibidang Pendidikan, untuk biasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu dan berpretasi, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyambut baik dan positif kepada sdr Bupati dan Pemkab Rembang, hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari program sdr. Bupati, untuk memajukan pendidikan di Rembang, dan sebagai infestasi peningkatan kualitas Sumbang daya Manusia di kabupaten Rembang , sehingga kedepan Rembang tidak ketinggalan dengan daerah tetangga yang sudah lebih maju.
3. Fraksi PPP mengusulkan, agar Pemkab Rembang memperhatikan Nelayan , Petani Tambak , dan Petani , dengan membuat Program, bagian sungai yang di muara laut, dibuatkan Jeti , supaya pasir dari laut tidak masuk ke sungai, sehingga kapal dapat sandar melalui sungai , dan mohon dibuatkan Dam dibagian hulu muara disungai, agar air laut yang asin, tidak menyatu campur dengan air tawar, sehingga petani tambak dan Petani , dapat memanfaatkan air tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan, hal ini akan dapat meningkatkan hasil para nelayan dan petani.
4. Berkenaan dengan pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa sekabupaten Rembang, yang akan difasilitasi Pemkab Rembang, dari info yang kami dengar, peserta seleksi jauh lebih banyak dari prediksi, dengan jumlah sebanyak antara 4000 orang peserta, dari 287 desa , kami dari Fraksi PPP mohon kepada Pemkab Rembang, agar pelaksanaan seleksi dimaksud diantisipasi sedemikian matang, sehingga seleksi dapat berjalan lancar, aman , dan hasilnya semua masyarakat dapat menerima dengan baik dan positif.
5. Mengingat waktu musim hujan akan segera tiba, dan banyaknya pengelola tambang, baik batu kalsit, batu andesit dan Trass atau yang lainnya, kami mohon kepada sdr. Bupati, agar mnginstruksikan pada OPD terkait, untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap terjadinya bencana , baik banjir ataupun tanah longsor.

Demikian Pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, untuk selanjutnya mohon tanggapan sdr. Bupati , tentang beberapa catatan kami tersebut di atas.

Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya...

Wallahul Muwaffiq Ila aqwamitthoriq.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 20 Nopember 2017

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS



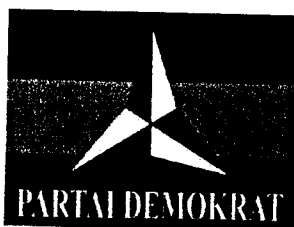
ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 20 NOVEMBER 2017



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

SENIN, 20 NOVEMBER 2017

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff

Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya kita masih diberi kesehatan, keselamatan lahir dan batin, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2018.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami anjurkan sebagai bahan masukan demi kebaikan Rembang yang kita cintai, antara lain :

1. Kami berpesan kepada PEMKAB Rembang untuk perencanaan anggaran 2018 ini benar-benar cermat, teliti dan tepat karena kenaikan PAD dan belanja sangat berubah drastis apalagi adanya penurunan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Kami berharap bahwa di KUAPPAS anggaran untuk TPP PNS sangat tinggi naik sebesar 100 persen sehingga kami menuntut kinerja dan penyerapan anggaran dimasing masing OPD bisa optimal, Tidak ada alasan lagi PNS malas bekerja.
3. Pada anggaran belanja langsung sebesar Rp. 790.882.124.184 masih terdapat persentase belanja pegawai yang tinggi (18,90%) indikasinya masih ada honor-honor untuk setiap kegiatan, sementara disisi lain Pemerintah Kabupaten telah menaikkan TPP, sehingga akan terjadi dobel pendapatan, mohon penjelasan lebih lanjut.

4. Untuk pekerjaan fisik atau teknis pada tahun 2018 biaya umumnya masih menempel di tiap item pekerjaan, padahal bulan yang lalu Pemerintah berjanji untuk bius akan di pisah.
5. Mohon perencanaan untuk 2018 agar teliti dan cermat sesuai kebutuhan masyarakat karena tahun 2017 ini banyak perencanaan kegiatan yang terkesan mubadzir dan tidak tepat sasaran. Contoh pelebaran jembatan sulang dan waru hanya pelebaran akan tetapi jembatan induknya yg masih bagus ikut di bongkar, dan di ds geger simo ada jembatan di bangun tetapi tidak bisa menghubungkan akses jalan sehingga tidak bisa dilewati.
6. Dengan semakin banyaknya anggaran dana untuk desa, maka diharapkan tenaga pendamping yang berkualitas juga harus terpenuhi.
7. Di Puskesmas 2 banyak kekurangan tenaga medis, dengan telah menjadi BLUD maka untuk mengatasi kekurangan tenaga agar segera ada perekrutan tenaga BLUD, Demikian juga di RSUD banyak sekali tenaga magang, Kami usulkan agar juga melakukan perekrutan pada tahun 2018.
8. Kami mohon segera di berikan kebijakan terkait dengan banyak guru-guru di SD yang kurang bahkan ada dalam satu SD hanya ada 2 guru PNS, di UPT kec sarang kurang 105 guru kec kragan kurang 73 guru, kec. Sluke kurang 62 guru dan UPT yang lain

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 November 2017

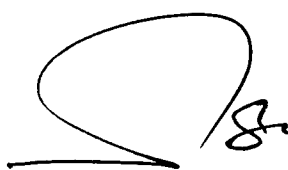
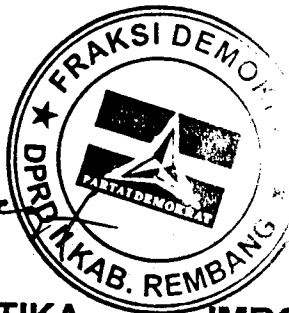
FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS

EKA SISWA KARTIKA

IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2018



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2018

Disampaikan oleh : H.Muhammad Asnawi,S.PdI

pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, senin 20 Nopember 2017

Assalamu 'alaikum wr wb.

- Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang
- Segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.
- Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.
- Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Pemkab Rembang serta para Camat

Segala puji bagi Allah SWT , berkat nikmatNya pada hari ini kita dapat bertemu bertatap muka menghadiri sidang paripura tentang Raperda APBD 2018 Kabupaten Rembang kali ini dalam keadaan sehat wal'afiat, Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulalloh Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda tentang APBD 2018, Demikian pula kepada saudara Bupati diucapkan banyak terima kasih atas disampaikannya Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pimpinan sidang dan Hadirin yang berbahagia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung peran pemerintah Kabupaten Rembang dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan publik, implementasi regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.

APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan Pemkab yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan tepat sasaran. APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan

Sidang Dewan yang kami muliakan.....

Perkenankan FPKB menyampaikan pandangan, saran dan pertanyaan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

1. Terhadap Pendapatan Daerah, FPKB memberikan apresiasi positif atas kenaikan Proyeksi Pendapatan Daerah sebesar 0,76 % dari Proyeksi pendapatan pada APBD Perubahan 2017. Di saat Dana Perimbangan mengalami penurunan, justru pendapatan pada APBD 2018 tetap naik. Namun kami sayangkan, kenaikan proyeksi pendapatan tersebut kebanyakan berasal dari Hibah sebesar 57,43 M dibanding hibah pada APBD P 2017 yang diproyeksikan hanya sebesar 2,56 M sehingga ada selisih sebesar 54,87 M. maka dari itu kami mohon saudara Bupati untuk menjelaskan detail pendapatan yang bersumber dari hibah tersebut.
2. Terhadap PAD sebesar **Rp. 271.502.204655,00** yang menurut kami kenaikan target ini cukup signifikan di banding target pada APBD 2017 meskipun juga masih lebih rendah.dibanding proyeksi PAD pada APBD Perubahan 2017. Kami berharap target ini bisa tercapai dan kami mohon saudara Bupati menjelaskan detail kenaikan proyeksi PAD tersebut...

B. BELANJA

Pada pos belanja langsung terutama pada belanja ada kenaikan yang cukup menggembirakan di bandingkan belanja modal pada APBD 2017. FPKB berharap anggaran pada belanja modal ini bisa terserap 100 %.maka apresiasi yang setinggi – tingginya kepada saudara bupati.

C. PEMBIAYAAN

Pada postur penerimaan pembiayaan daerah angka **Rp. 93,104,380,029** . Mohon pemkab Rembang agar cermat dalam menghitung angka tersebut, sebab angka SILPA tersebut kami anggap masih berpotensi naik dikarenakan banyaknya kegiatan Th. 2017 yang tidak terlaksana dikarenakan OPD yang masih malas untuk penyerapan anggaran sehingga sampai pada pertengahan November ini penyerapan anggaran 2017 induk belum ada 80% , oleh karena itu FPKB berharap agar ditahun mendatang bisa ditingkatkan lagi.

Yang terakhir kalinya kami FPKB mengucapkan Selamat Hari Anak Sedunia yang hari ini senin 20 November 2017 telah berusia 63 Tahun, Hari Anak adalah hari penghargaan sebesar-besarnya untuk mempersiapkan generasi penerus perjuangan Bangsa, karena anak adalah buah hati yang selalu hadir dan menjadi harapan masa depan peradapan.

Hadirin Yang Kami Muliakan.....

Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan dan atas perhatian semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 20 November 2017

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa





PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Tanggal : Nopember 2017

TENTANG : RAPERDA APBD 2018

Dibacakan Oleh :

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi.....MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

**Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab.
Rembang**

**Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab.
Rembang**

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Sebagai pembukaan dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini kami terlebih dahulu ingin mengucapkan Selamat Hari Pahlawan yang tiba pada tanggal 10 Nopember kemarin, semoga ALLAH SWT mengampuni segala dosa dan menerima pengorbanan para pahlawan sebagai amal solehnya.

Setelah mendengarkan penyampaian Raperda APBD tahun 2018 oleh saudara Bupati dan setelah membaca dan mempelajari dalam Rapat Fraksi hari ini. Maka kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2018. Dalam menyampaikan pemandangan umum atas Raperda APBD tahun anggaran 2018 kali ini kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya :

1. Guna meningkatkan PAD kab. Rembang di sector kelautan Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap saudara Bupati memerintahkan dinas memerintahkan Dinas Satpol PP untuk memback up Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam upaya penegakan Perda di TPI kab. Rembang supaya Perda TPI dapat dilaksanakan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.
2. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang kami berharap BPPKAD kab. Rembang agar berani menjalankan program Topping Box yang telah dianggarkan

4. Dengan adanya rencana kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di kab. Rembang kami berharap supaya di imbangi dengan kinerja ASN yang lebih baik lagi, lebih disiplin dan lebih professional untuk melayani masyarakat di kabupaten Rembang ini.
5. Terkait penganggaran program BPJS kami berharap ada penambahan anggaran dan harus ada proses verifikasi ulang bagi penerima BPJS agar program ini dapat dinikmati oleh pihak – pihak yang benar – benar berhak mendapatkan yaitu masyarakat kurang mampu.
6. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap agar sekolah – sekolah yang tidak mendapatkan target murid / anak didik supaya digrouping untuk mengantisipasi adanya masalah kekurangan tenaga pengajar.
7. Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbaiki pelayanan puskesmas di setiap kecamatan dengan membangun puskesmas yang lebih layak,tapi kami juga menyarankan dalam pembangunan gedung puskesmas ini dibarengi dengan pengadaan alat – alat medis yang dibutuhkan sehingga puskesmas ini benar – benar bisa menjadi tempat berobat bagi masyarakat yang jauh dari RSUD.

Itulah beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam rangka sebagai masukan bagi Pemkab dalam menyusun Raperda APBD tahun 2018 semoga bermanfaat bagi kita

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya. Terima kasih.....

Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamu alaikum wr. Wb.

Salam Restorasi.....MERDEKA!!!

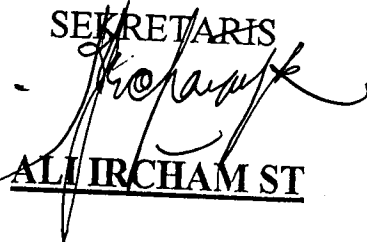
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



KETUA


JASMANI

SEKRETARIS

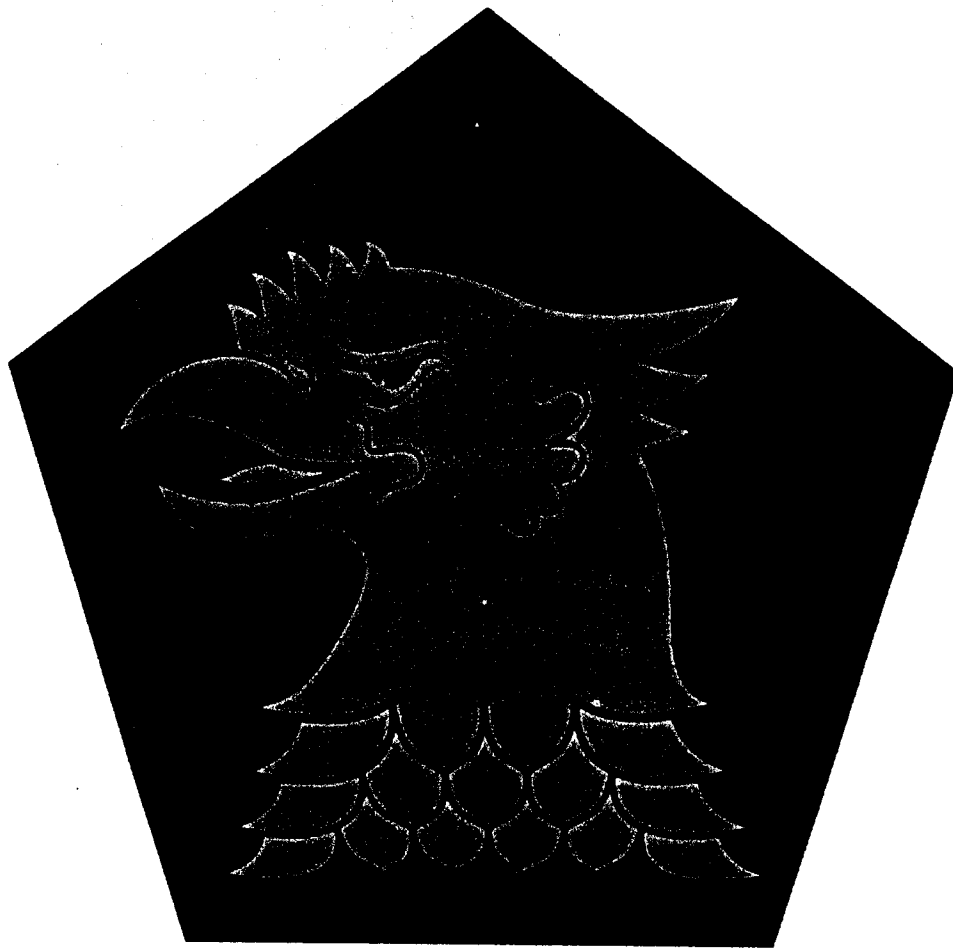

ALI IRCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 20 November 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Kepada Sdr. Pimpinan DPRD dan Segenap Anggota DPRD Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Kepada Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Kepada Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang yang kami Hormati dan kami Mulyakan

Yang kami hormati dan Kami mulyakan Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Paru Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari yang baik ini, kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Ke 2 dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerahn (APBD) Kabupaten Rembang Tahun 2018 dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat.

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebahagiaan di

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang kami hormati dan kami mulyakan,

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan Selamat Hari Anak-anak sedunia, yang jatuh pada hari ini tanggal 20 November. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak dan meberikan hak bagi anak-anaknya agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Jaya dan Runtuhnya sebuah bangsa dan negara ada di tangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sehubungan dengan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang Fraksi Gerindra mendasar dari kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang akan memberikan beberapa catatan-catatan kritis sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Postur anggaran dalam pos Pendapatan Asli Daerah/ PAD bahwa angka yang dipatok oleh Pemerintah daerah melejit cukup tinggi yaitu sebesar 271,5 M, artinya ada kenaikan dari tahun 2017 ini yaitu sebesar 215 M. Mohon dijelaskan dari sektor mana yang meningkat cukup signifikan! Apakah itu sudah sesuai dengan regulasinya?
2. Pada dasarnya APBD itu gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat agar masyarakat sejahtera. Ukuran tingkat kesejahteraan bisa dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan program-program pengentasan kemiskinan sangatlah banyak, mulai dari adanya program KIS/BPJS, KIP, RTH, RTLH dan program-program lain yang langsung menyentuh pada Rumah Tangga Miskin, tetapi pada kenyataannya, aplikasi program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, karena datanya tidak di perbarui/ tidak di update setiap tahun sehingga menimbulkan berbagai masalah. Karena tingkat kesejahteraan Rumah tangga itu bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Ada masyarakat sudah dulu kaya, tapi sekarang jatuh miskin atau sebaliknya. Ada rumah tangga yang saat ini kaya, tapi mendapat BPJS, KIS,

RTH RTLH dari pemerintah, hasil dari subsidi. Untuk itu pemerintah

Berapa anggaran yang di alokasikan untuk memenuhi Program BPJS non kuota?

Kami berharap agar ketersediaan anggaran tersebut bisa terpenuhi, agar bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rembang tercinta.

3. Dalam Pembiayaan Daerah sebesar 1 M pada PT. Rembang Migas Energi sudah sesuai dengan amanah dari Perda? Karena seingat kami di dalam Perda, di tahun 2018 ini alokasinya sebesar 2 M. Mohon penjelasan! Karena Komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang agar BUMD khusus ini bisa berdiri dan beroperasi dengan cepat dan lancar, supaya bisa memberikan deviden untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang kami hormati dan kami muliyakan,

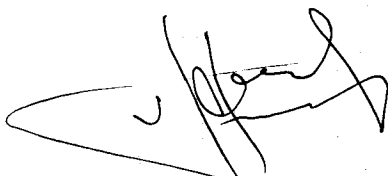
Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Amiin Ya Robbal alamiin..

Billahitaufiq wal hidaayah,

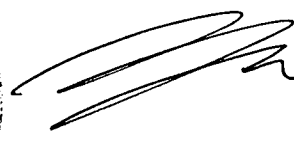
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Nopember 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


H. CHASANNUDIN




PUJI SANTOSO, SP. MH.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN
REMBANG

terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang - Tahun Anggaran 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Senin, 20 Nopember 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya Sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridhoNya.

Mari merenung sejenak memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember yang lalu, untuk mengenang para pahlawan yang telah berkorban demi bangsa dan negara. Tak lupa kami mengucapkan selamat kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang belum lama ini dilantik, semoga saudara sekalian bisa menjalankan amanah dengan baik untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Walaupun pembahasan RAPBD 2018 ini terkesan tergesa-gesa, pada kesempatan ini Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan Pemandangan Umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 yang pagi tadi disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, sbb.

kapasitas fiskal yang memadai. Kapasitas fiskal suatu daerah eksis tercermin melalui penerimaan umum dari APBD termasuk PAD.

2. Kalau kita melihat Perencanaan KUAPPAS yang disampaikan Pemkab kepada DPRD, sempat terjadi pembetulan hingga 2 kali, kami ingin sampaikan adanya koreksi berkurangnya DAU sebesar Rp. 92.334.716.500,- M mengakibatkan terkoreksinya beberapa rencana program besar Pemerintah Kabupaten Rembang. Sebagai contoh,

- Rencana pembangunan Pasar Kota yang semula oleh Sdr. Bupati disampaikan dalam berbagai kesempatan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50 M, kemudian muncul di KUAPPAS menjadi Rp 45. M kemudian terkoreksi menjadi Rp 0,- Padahal dalam kebijakan pembangunan TA 2018 yang diantaranya memfokuskan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan pasar tradisonal dan UMKM. Mohon dijelaskan
- Mengenai Rencana pembangunan AKN (Akademi Komunitas Negeri) Rembang yang dalam KUAPPAS dialokasikan Rp. 4.5 M terkoreksi menjadi Rp. 0,- Padahal AKN adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Rembang dan kita butuh kepercayaan dari induk AKN yaitu UNSOED Purwokerto. Bagaimana penjelasannya dalam hal ini?
- Dalam hal perencanaan pembangunan kami mengusulkan sbb.
 - ✓ Perencanaan program hendaknya telah tersusun H-1 setahun sebelum tahun pelaksanaan), sehingga bisa dilaksanakan tepat waktu.
 - ✓ Perencanaan haruis diperhitungkan masak-masak

dibongkar semua padahal hanya untuk memperlebar jembatan 10 cm kanan-kiri,

3. Fraksi Karya Sejahtera memandang, soko guru pendapatan daerah tercermin dalam kemampuan PAD. Semakin besar kapasitas PAD suatu daerah akan semakin eksis daerah tersebut. Kami melihat RAPBD 2018 yang disajikan oleh Saudara Bupati tadi untuk PAD kurang akseleratif, belum diimbangi dengan upaya pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah. Kami melihat potensi itu belum dibuatkan sistem yang baik padahal masih banyak sumber PAD yang belum terpungut. Contoh, pajak galian C dan retribusi TPI yang tidak optimal.
4. Pada RAPBD TA 2018 ini kami melihat SILPA yang cukup tinggi yakni Rp. 93.104.380.029,-. Hal ini mengindikasikan bahwa OPD (organisasi perangkat daerah) dalam melaksanakan pembangunan APBD TA 2017 kurang bekerja keras, sehingga berpengaruh pada jalannya pembangunan dan berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang.
5. Berkaitan dengan rencana kenaikan TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) bagi ASN (aparatur sipil negara) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Fraksi Karya Sejahtera memandang kenaikan TPP ini harus dipertimbangkan sebaik-baiknya.
 - Apakah kenaikan TPP ini sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, apakah tidak mengganggu program-program pembangunan yang lain.
 - Dengan kenaikan TPP nanti, kami berharap kinerja ASN Kabupaten Rembang meningkat. Tidak terlihat lagi pegawai yang menganggurkan diri apalagi nongkrong di

lokasi tapi dibiayai oleh 2 OPD, ada kegiatan yang dalam APBD teranggarkan tapi tidak masuk dalam DPA.

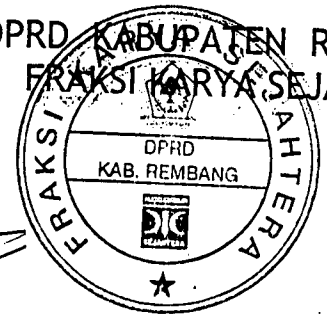
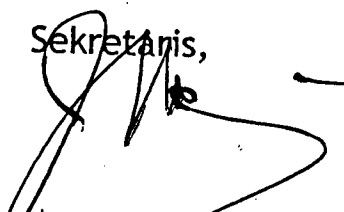
- Semua OPD (organisasi perangkat daerah) yang menjalankan fungsi pelayanan publik hendaknya melayani masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kepada OPD pembina kepegawaian, yakni BKD dan Inspektorat harus selalu mengawasi kinerja aparatur sipil negara atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Saudara pimpinan sidang dan para hadirin sekalian.

Sebelum mengakhiri pemandangan umum ini perkenankanlah kami mengutip sebuah sesanti sbb: “Nêgârâ bisa têntîrêm murah sandhang kalawan pangan lamun penguwâsâné darbé sipat bèrbudi bâwâ laksana lan pâra kawulâ pâdhâ senang nyambút karya”. Artinya, negara itu dapat tenteram, murah sandhang pangan jikalau para penguasa mempunyai sifat adil, berjiwa mulia dan rakyatnya giat bekerja.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Ketua,   Sekretaris, 

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Dibacakan Oleh : NUR JANNAH

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD T.A 2018 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Tahun 2018 dicanangkan sebagai tahun “Penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandirian Daerah”. Terkait

Kami mengharapkan penjelasan, apakah di tahun 2018 pemerintah kabupaten Rembang akan melakukan rekrutmen PNS dan apakah sudah dicadangkan pembiayaannya.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Supaya lebih optimal, dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar dapat dipersiapkan lebih awal. Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda APBD T.A 2018 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

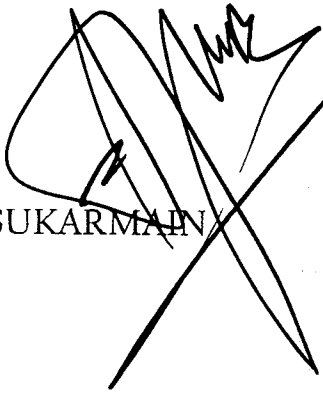
Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 20 November 2017

**FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG**

Ketua


SUKARMAN

Sekretaris


SAHNINGSIH, SE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (III)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

Hari : SELASA
Tanggal : 21 November 2017
Waktu : 10.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
 3. Pengesahan Rancangan Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2018;
 4. Penutup.

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 9 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 7 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 4 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 5 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 3 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 3 orang |
| Jumlah | <hr/> : 35 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 1 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 1 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 2 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 3 orang |

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah yang telah diberikan kepada kita, baik kesehatan jasmani maupun rokhani sehingga kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna Ketiga DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku pada rapat paripurna

ketiga ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang. Dengan demikian kuorum rapat paripurna ketiga ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 12.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 17 November 2017 dalam rangka penjadwalan pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018, terdapat dua agenda pokok yang harus kita laksanakan dalam rapat paripurna ketiga ini.

Selengkapnya saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara pokok yang pertama, yaitu Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Kepada Saudara Bupati Rembang, waktu dan tempat dipersilahkan.

=== JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ===

➤ *(Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya setelah rapat paripurna ini, pada hari ini juga akan dilaksanakan dua agenda rapat yakni : Rapat Badan Anggaran dan TAPD dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dilanjutkan dengan Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi dengan acara membahas strategi dan distribusi pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Adapun untuk Rapat Paripurna Keempat akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara ketiga, yaitu Pengesahan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan :

- ayat (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda
- ayat (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- ayat (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- ayat (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Memperhatikan ketentuan tersebut, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah disampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2018 kepada DPRD, melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nomor : 188.3/2362/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Pengiriman Propemperda Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2018. Selanjutnya oleh DPRD Kabupaten Rembang, melalui Badan Pembentukan Perda dilakukan koordinasi penyusunan Program Pembentukan Perda bersama Tim Penyusun Pembentukan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 20 November 2017, yang hasilnya berupa Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2018 sebagaimana fotocopy yang berada di tangan Saudara-saudara.

“ Apakah Rancangan Program Pembentukan Perda Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat disetujui dan disahkan menjadi Program Pembentukan Perda Tahun 2018 ?”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Agenda-agenda pokok dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD, mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadiran Saudara-saudara, ***Selamat Bekerja dalam membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018***, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita sekalian. Amiin.

Akhirnya dengan mengucap **“Alhamdulillahirobbil ‘alamin“** tepat pukul..... WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA,

SEKRETARIS, *N*

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

**LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;**

**LAMPIRAN II : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi- Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun
Anggaran 2018;**

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI
TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SELASA, 21 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 ✓	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3 ✓	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAFENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11 ✓	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 ✓	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	

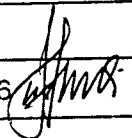
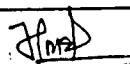
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI TERHADAP
RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SELASA, 21 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Noor effendi		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Masheer	Kabag	8
9	BAG. HUKUM	Tri Haryanto		9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Nur H		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latiphe H		13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Moenik K	Kasubag Kelembagaan	14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	Mukoni	Kabir	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Drs Widyum	ka	18
19	DINSOSP2KB			19
20	B K D			20
21	B P B D	Purnadi S	ka	21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DPKP/ DINPERKIM	gustiennurn	PLK	23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Gopri	Ka K	24
25	DINDIKPORA	Adi Satrio	ka K	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Akhsanuddin	ka K	26
27	DINTANPAN	Suratman		27
28	DINLUTKAN			28

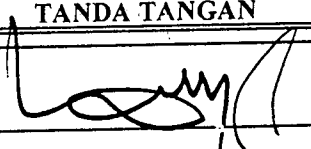
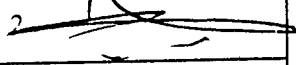
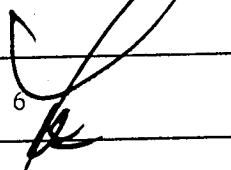
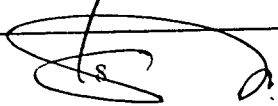
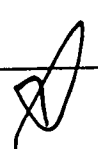
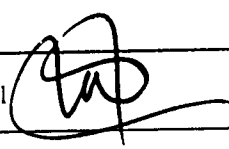
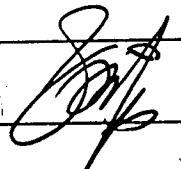
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dai Purwana	Kadinas	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryosa	sebidin	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	ka	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Mihir	inli	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	TEGULTI. S	ka	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	H-WALUYO	Kasat	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. PEMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64

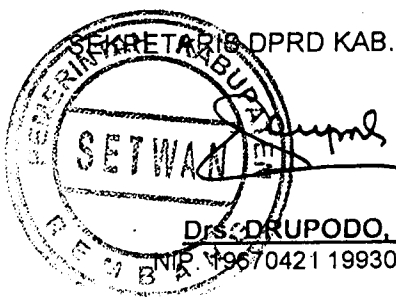
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Nasudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90
91	M. AMI HUR ROHMAN.	IK. POLRES		91. 
92	A. MURTAHO	"		92 
93	ABUS	KODIM		93 
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI
TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : SELASA, 21 NOVEMBER 2017

PUKUL : 10.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	<i>Eddy Kuswanto</i>	1 
2	CAMAT KALIORI	<i>M. ST. TO. CIT</i>	2 
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	<i>Taswadi</i>	5 
6	CAMAT PAMOTAN	<i>U. W. P. O. D. O.</i>	6 
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	<i>Kusnadi</i>	8 
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	<i>Indarto</i>	10 
11	CAMAT SEDAN	<i>Subhan</i>	11 
12	CAMAT SIKUKE	<i>Moch Solih</i>	12 
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14



Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2018



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Saudara Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	<u>I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>	
1	Usulan peningkatan TPP agar dapat meningkatkan kinerja PNS lebih efektif dan optimal	1 Akan kami tindaklanjuti pelaksanaan pemberian TPP sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ASN/PNS, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan anggaran secara optimal.
2	Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	2 Pemerintah Kabupaten Rembang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rembang, salah satunya dengan memberikan beasiswa prestasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK sampai dengan Perguruan Tinggi. Kami akan melanjutkan program tersebut dengan mekanisme yang lebih baik agar dapat bermanfaat dan tepat sasaran
3	Pembangunan Jetti dan Dam di bagian sungai yang di muara laut	3 Sesuai Permen PUPR No.4/PRT/2015 tentang sungai, diatur bahwa Pengelolaan sungai di Kabupaten Rembang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga Program terkait sungai perlu diusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR.
4	Pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa se Kabupaten Rembang agar dapat berjalan dengan lancar	4 Sesuai dengan Perbup No. 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang telah diubah dengan Perbup No. 37 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yang diatur secara jelas mekanisme pengangkatan Perangkat Desa.
5	Tindakan antisipasi terhadap terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di lokasi tambang	5 Terima kasih, kami perhatikan dan menjadi prioritas dalam penanganan pasca banca di lokasi dimaksud.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	
1.	Perencanaan APBD 2018 diharapkan cermat, teliti dan tepat karena adanya kenaikan PAD dan penurunan dana perimbangan	1. Dalam perencanaan Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah telah menghitung secara cermat terkait potensi-potensi pendapatan secara cermat, teliti dan tepat terhadap kenaikan PAD.
2.	Kinerja dan penyerapan anggaran dituntut optimal dengan adanya kenaikan TPP	2. Pemerintah kabupaten telah konsisten dalam menaikkan Tunjangan Penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN/PNS dengan tujuan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan anggaran secara optimal.
3.	Mohon penjelasan dengan adanya presentasi belanja pegawai yang tinggi (18%) dan disisi lain ada kenaikan TPP sehingga akan terjadi dobel anggaran	3. Terkait dengan penganggaran belanja langsung sebesar Rp.790.882.124.184 memang masih ada penganggaran belanja pegawai sebesar Rp. 149.543.818.200 atau 18,9% dengan kriteria sebagai berikut: • Honorarium PNS sebesar Rp.30.926.089.000,- • Honorarium non PNS sebesar Rp. 47.906.714.000,- • BOS sebesar Rp.5.690.000.000,- • BLUD RSUD sebesar Rp.43.937.151.000,- • PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp. 21.083.864.200,- Penganggaran terkait dengan honorarium PNS dan Non PNS dalam rangka menunjang program dan kegiatan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4.	Pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2018 biaya umumnya masih melekat di item pekerjaan	4. Mekanisme pencantuman biaya umum melekat didalam Belanja Modal dimaksud hal ini memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
5.	Perencanaan Tahun Anggaran 2018 diharapkan teliti dan cermat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.	5. Dalam merencanakan kegiatan 2018 Pemerintah Kabupaten Rembang telah melaksanakan kaidah-kaidah dokumen penyusunan anggaran yang meliputi penjaringan aspirasi masyarakat lewat MUSRENBANG DES, kemudian ditindaklanjuti , MUSRENBANGCAM dan MUSRENBANGKAB serta pemenuhan pokok-pokok pikiran sehingga atas tahapan dimaksud dihasilkan Dokumen RKPD dan RENJA OPD.
6.	Diharapkan adanya tenaga pendamping dana desa yang berkualitas.	6. Terima kasih. Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa maupun pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah akan selalu memfasilitasi kegiatan yang ada di masing-masing desa oleh pendamping yang telah diampu oleh OPD yang mengelola dana dimaksud.
7.	Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis diusulkan melakukan perekrutan pada tahun 2018.	7. Dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga di puskesmas, kami sedang menyiapkan payung hukum berupa Perbup tentang rekrutmen tenaga di Puskesmas BLUD. Adapun jumlah tenaga yang dibutuhkan disesuaikan dengan analisis beban kerja berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kemampuan BLUD dan APBD.
		Sedangkan di RSUD dr. R. Soetrasno belum mengganggu rekrutmen pegawai BLUD dengan pertimbangan masih memprioritaskan peningkatan belanja modal untuk menambah kapasitas dan pengembangan layanan, Rekrutmen Tenaga magang merupakan bentuk kerjasama rumah sakit dengan institusi pendidikan mitra, dan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
8.	Mohon diberikan kebijakan terkait kekurangan guru SD (PNS) di Kab. Rembang.	8. Berkaitan dengan SD yang masih mengalami kekurangan guru PNS, mengingat jumlah guru yang terbatas dan belum adanya persetujuan dari pemerintah pusat untuk melakukan rekrutmen guru PNS kebijakan yang dilaksanakan adalah dengan memaksimalkan tenaga guru Non PNS yang mempunyai kualifikasi pendidikan S1/D4 dan memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerintah Kab. Rembang telah memperhatikan kesejahteraan guru Non PNS dengan memberikan bantuan kesejahteraan dengan besaran antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per bulan.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN															
	III. FRAKSI P K B																
1.	Proyeksi Pendapatan mengalami kenaikan	Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, " Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satua Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada SKPKD, Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS ". Adapun rincian Pendapatan Hibah sebesar Rp. 57.432.800.000,00 adalah : <table> <tr> <td>Pendapatan BOS</td><td>Rp.</td><td>56.932.800.000</td></tr> <tr> <td>PAMSIMAS</td><td>Rp.</td><td>500.000.000</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td></td><td>57.432.800.000</td></tr> </table> Dasar pencantuman besaran tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2018.	Pendapatan BOS	Rp.	56.932.800.000	PAMSIMAS	Rp.	500.000.000	Jumlah		57.432.800.000						
Pendapatan BOS	Rp.	56.932.800.000															
PAMSIMAS	Rp.	500.000.000															
Jumlah		57.432.800.000															
2.	PAD sebesar Rp. 271.502.204.655,00 berharap target ini bisa tercapai dan mohon dijelaskan secara detail.	Besaran PAD Rp. 271.502.204.655,00 adalah : <table> <tr> <td>Pendapatan Pajak Daerah</td><td>Rp.</td><td>94.514.000.000</td></tr> <tr> <td>Hasil Retribusi Daerah</td><td>Rp.</td><td>22.928.499.000</td></tr> <tr> <td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>Rp.</td><td>9.257.000.000</td></tr> <tr> <td>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah</td><td>Rp.</td><td>144.802.705.655</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>Rp.</td><td>271.502.204.655</td></tr> </table> Kami optimis rencana kenaikan pendapatan tersebut dapat dicapai, mengingat : - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan - Telah beroperasinya PT. Semen Indonesia Rembang - Pemberlakuan e – Retribusi dilingkungan	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	94.514.000.000	Hasil Retribusi Daerah	Rp.	22.928.499.000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	9.257.000.000	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp.	144.802.705.655	Jumlah	Rp.	271.502.204.655
Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	94.514.000.000															
Hasil Retribusi Daerah	Rp.	22.928.499.000															
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	9.257.000.000															
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	Rp.	144.802.705.655															
Jumlah	Rp.	271.502.204.655															

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN																																	
3.	SilPA sebesar Rp. 93.104.380.028,00 apakah sudah dihitung secara rinci	Besara SilPA sebesar Rp. 93.104.380.028,00 terdiri dari : <table> <tr> <td>Dana Transfer</td><td>Rp.</td><td>7.790.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Retribusi Daerah</td><td>Rp.</td><td>2.500.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>Rp.</td><td>1.000.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Bantuan Provinsi (RSU pada Tahun 2013)</td><td>Rp.</td><td>2.000.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Gaji</td><td>Rp.</td><td>11.500.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Sisa Tender</td><td>Rp.</td><td>13.903.506.000,00</td></tr> <tr> <td>Efisiensi Belanja</td><td>Rp.</td><td>50.410.874.028,00</td></tr> <tr> <td>Hibah</td><td>Rp.</td><td>1.500.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Bantuan Keuangan</td><td>Rp.</td><td>2.000.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Belanja Tidak Terduga</td><td>Rp.</td><td>500.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>Rp.</td><td>93.104.380.028,00</td></tr> </table>	Dana Transfer	Rp.	7.790.000.000,00	Retribusi Daerah	Rp.	2.500.000.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	1.000.000.000,00	Bantuan Provinsi (RSU pada Tahun 2013)	Rp.	2.000.000.000,00	Gaji	Rp.	11.500.000.000,00	Sisa Tender	Rp.	13.903.506.000,00	Efisiensi Belanja	Rp.	50.410.874.028,00	Hibah	Rp.	1.500.000.000,00	Bantuan Keuangan	Rp.	2.000.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	Rp.	500.000.000,00	Jumlah	Rp.	93.104.380.028,00
Dana Transfer	Rp.	7.790.000.000,00																																	
Retribusi Daerah	Rp.	2.500.000.000,00																																	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	1.000.000.000,00																																	
Bantuan Provinsi (RSU pada Tahun 2013)	Rp.	2.000.000.000,00																																	
Gaji	Rp.	11.500.000.000,00																																	
Sisa Tender	Rp.	13.903.506.000,00																																	
Efisiensi Belanja	Rp.	50.410.874.028,00																																	
Hibah	Rp.	1.500.000.000,00																																	
Bantuan Keuangan	Rp.	2.000.000.000,00																																	
Belanja Tidak Terduga	Rp.	500.000.000,00																																	
Jumlah	Rp.	93.104.380.028,00																																	

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
IV. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN & NASDEM		
1.	SATPOL PP agar memback-up Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya Penegakan Perda di TPI dapat dilaksanakan	1. Terima kasih, peran SATPOL PP dalam Penegakan Perda tentang Retribusi Daerah termasuk Retribusi Tempat Pelelangan Ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilaksanakan guna mengantisipasi kebocoran penerimaan setoran ke Kas Daerah atas setoran Pendapatan Retribusi Daerah.
2.	Program Taping box agar dijalankan	2. Rencana penggunaan taping box saat ini masih dalam proses evaluasi dan pemetaan, sehingga dari hasil tersebut nantinya sesuai dengan potensi-potensi pendapatan yang ada.
3.	OPD dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan lebih matang dan terencana	3. Pada waktu menyusun RAPBD telah sesuai perencanaan dimasing-masing OPD yang diusulkan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, kemudian ditampung dalam Renja SKPD dan telah disepakati dalam KUA-PPAS selanjutnya tertuang pada DPA didalamnya termasuk rencana pelaksanaan kegiatan per Triwulan masing-masing OPD.
4.	Kenaikan TPP agar diimbangi dengan kinerja ASN yang lebih baik, lebih disiplin dan lebih professional	4. Mekanisme pembayaran TPP kami berikan dengan melampiri instrumen terkait Sasaran Kerja Pegawai, Target Pelaksanaan Kerja Pegawai, Reallsasi Pelaksanaan Kerja Pegawai dan Daftar Hadir Harian Pegawai.
5.	Penambahan anggaran BPJS harus ada verifikasi ulang bagi penerima BPJS	5. Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Rembang kedalam Program JKN secara otomatis anggaran BPJS telah terverifikasi melalui OPD terkait.
6.	Sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan murid agar digroping untuk mengantisipasi masalah kekurangan tenaga pengajar	6. Terima kasih, akan kami kaji masukan dimaksud.
7.	Pembangunan Gedung Puskesmas agar dibarengi dengan pengadaan alat-alat medis	7. Sebagaimana Alokasi dan Petunjuk Teknis DAK, memang masih diperuntukkan Pembangunan Gedung Puskesmas, selanjutnya terkait pengadaan alat-alat medis akan kami penuhi guna kelancaran pemeriksaan dan pelayanan kepada masyarakat.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI PARTAI GERINDRA	
1.	Angka dalam pos Pendapatan Asli Daerah melejit cukup tinggi sebesar 271,5 M artinya ada kenaikan dari tahun 2017 sebesar 215 M. Mohon penjelasan dari sektor mana yang meningkat cukup signifikan dan sudah disesuaikan dengan regulasi?	1. Telah kami jawab pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
2.	Bagaimana langkah Bupati terkait dengan program pengentasan kemiskinan seperti KIS/BPJS, KIP, RTH, RLTH banyak yang tidak tepat sasaran, karena datanya tidak diperbarui setiap tahun sehingga menimbulkan berbagai masalah dan berapa anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi Program BPJS Non Kuota.	2. Langkah yang akan dilaksanakan adalah kita melakukan verifikasi ulang data kemiskinan melalui SLRT dan MPM dari data PBDT 2015 yang dilakukan mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang dilinkkan dengan TNP2K sehingga harapannya data lebih valid dan sesuai sasaran. Dan kegiatan ini untuk Kegiatan sosialisasi dan pemberian data base PBDT 2015 sudah dilakukan pada tahun 2017. Dan implementasi pelaksanaan sudah dianggarkan pada tahun 2018. ✓ Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan baik dari pusat, provinsi maupun daerah sehingga lebih terpadu, tepat sasaran dan terintegrasi. ✓ Menerapkan sistem informasi penanggulangan kemiskinan untuk pendataan kemiskinan. ✓ Anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi program BPJS Non Kuota untuk Tahun 2018 adalah Rp. 2.014.400.000,00 yang ditujukan untuk 20.000 peserta.
3.	Pembiayaan Daerah sebesar 1 M pada PT. Rembang Migas Energi apakah sesuai dengan amanah Perda yang alokasinya sebesar 2 M.	3. Sebagaimana diamanatkan dalam: - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
		Pembiayaan Daerah yang telah disertakan untuk PT. Rembang Migas Energi telah disalurkan sebesar Rp. 999.000.000,00 adapun pada RAPBD T.A 2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, adapun pemenuhan alokasi anggaran yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi akan kami penuhi dalam Perubahan APBD 2018.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VI. FRAKSI KARYA SEJAHTERA	
1.	Rencana Pembangunan Pasar Rembang yang semula akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 50 M, kemudian muncul di KUA PPAS menjadi Rp. 45 M kemudian terkoreksi menjadi Rp. 0,00. Mohon penjelasan.	1. Pada pertengahan pembahasan KUA /PPAS pemerintah kabupaten Rembang mendapat informasi resmi dari Pemerintah Pusat terkait dengan dana Perimbangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana pendapatan maupun belanja. Hal ini berdampak pada terkoreksinya rencana pendapatan maupun rencana belanja.. Koreksi tersebut bukan berarti Pembangunan Pasar Rembang ditiadakan, saat ini pemerintah kabupaten Rembang menyediakan anggaran untuk Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rembang. Untuk pasar tradisional tetap akan dilakukan penataan dengan sumber dana dari pemerintah pusat dan Propinsi.
2.	Rencana Pembangunan AKN (Akademi Komunitas Negeri) Rembang dalam KUA PPAS dialokasikan Rp. 4,5 M terkoreksi menjadi Rp. 0,00. Padahal AKN adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Rembang. Mohon penjelasan.	2. Pembangunan Kampus AKN ditunda dan akan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2019.
3.	Dalam hal perencanaan pembangunan kami mengusulkan sbb : ✓ Perencanaan program hendaknya tersusun H-1 setahun sebelum tahun pelaksanaan. ✓ Perencanaan harus diperhitungkan masak-masak sehingga tidak ada lagi monument mangkrak. ✓ Perencanaan harus diperhitungkan secara cermat sehingga tidak terjadi pemborosan.	3. Terima kasih atas masukan yang telah disampaikan dan akan kami tindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dalam proses perencanaan tahun selanjutnya akan dilaksanakan perbaikan antara lain dengan digunakannya sistem perencanaan yang terintegrasi dengan system penganggaran sehingga terwujud sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran demi terciptanya proses perencanaan yang lebih baik.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
4.	Dalam RAPBD 2018 PAD kurang akseleratif belum diimbangi dengan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah dengan masih banyak sumber PAD yang belum terpungut. Contoh pajak galian C dan Retribusi TPI yang tidak optimal.	4. Dalam rangka untuk rencana peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten telah melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi melalui : a. Kegiatan penilaian obyek-obyek khusus PBB-P2 Bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (UGM) b. Melakukan kegiatan pendataan masal terhadap PBB-P2 c. Memberlakukan penggunaan alat timbang pajak mineral bukan logam dan batuan serta penempatan tenaga di pos-pos yang menjadi lalu lintas angkutan pajak mineral bukan logam dan batuan. d. Kami juga merencanakan pemberlakuan E-Retribusi di pasar dan pelaksanaan Cash Managemen System (CMS) di TPI.
5.	SILPA yang cukup tinggi mengindikasikan bahwa OPD dalam melaksanakan APBD TA. 2017 kurang bekerja keras.	5. Telah kami jawab pada Fraksi PKB
6.	Apakah kenaikan TPP apakah sudah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu program-program pembangunan yang lain.	6. Telah kami jawab pada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VII. FRAKSI HARAPAN	
1.	Tahun 2018 dicanangkan sebagai tahun " Penguatan Pembangunan Potensi Ekonomi Unggulan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Kemandirian Daerah" mohon penjelasan detail tentang Penjabaran dari Kebijakan tersebut	Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi III yaitu " Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif ". Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada : - kemudahan investasi dan optimalisasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Rembang; - Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pasar tradisional dan UMKM, optimalisasi peran koperasi, serta pengembangan sentra sentra ekonomi kreatif; - Pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Rembang.

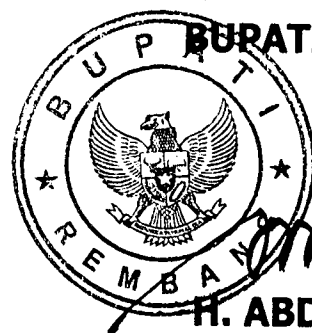
Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 21 Nopember 2017

**BUPATI REMBANG**

H. ABDUL HAFIDZ



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018

Hari : KAMIS
Tanggal : 30 November 2017
Waktu : 10.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
3. Pendapat Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
4. Persetujuan atas Raperda, dilanjutkan penandatanganan persetujuan dan penyerahan Keputusan DPRD;
5. Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan Raperda tentang

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 13 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah

Anggaran 2018. Rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna terakhir dalam membahas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dilalui dengan beberapa tahapan, baik yang bersifat internal, yakni dibahas oleh DPRD sendiri, maupun yang bersifat eksternal yakni dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rembang. Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ini merupakan bagian akhir dari tahapan proses perencanaan dan penganggaran, yang sudah didahului melalui penyusunan RKPD oleh pemerintah kabupaten, dan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2018 dan telah disepakati bersama oleh Bupati dan DPRD pada tanggal 10 November 2017. Semua hal tersebut di atas, adalah dalam rangka memenuhi semua kebutuhan belanja pemerintah Kabupaten Rembang, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, agar dapat mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Rembang seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 32 orang.

Dengan demikian kuorum rapat terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11. 30 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna hari ini sesuai yang diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 17 November 2017, sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018

5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018;
6. Penutup.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si. bersedia membacakannya.

===== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====

➤ ***(Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 terlampir)***

Terima kasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si. yang telah menyampaikan Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Kepada Saudara-saudara yang ditunjuk menyampaikan Pendapat Fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Puji Santoso, S.P.,M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : H. Ismari, S.H.
7. Fraksi Harapan : Paramita Prapanca ANR, S.Pd.

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

Nama Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuk acara berikutnya, yaitu Persetujuan Penetapan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama dan penyerahan Keputusan DPRD.

memberikan tanggapan, oleh karena semua dimulai dari pengambilan keputusan saudara-saudara dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada rekan-rekan Anggota yang hadir dalam rapat paripurna hari ini :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?”

=====S e t u j u u ! ! !=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota yang telah memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Dari persetujuan ini, selanjutnya akan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, diteruskan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD kepada Kepala Daerah.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Sekretaris DPRD berkenan memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan surat keputusan.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.
Dipersilahkan.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara terakhir, acara yang kelima yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Kepada saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

====PENDAPAT AKHIR BUPATI ====

➤ *(Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 terlampir)*

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota baik yang masuk dalam Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran, Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Dan kepada saudara-

Selanjutnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS, /



Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009

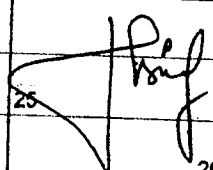
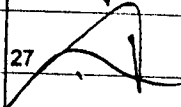
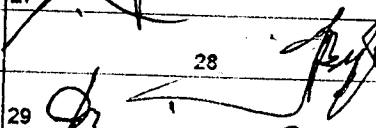
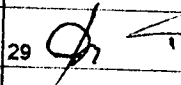
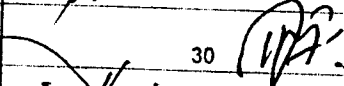
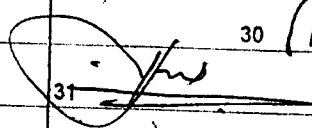
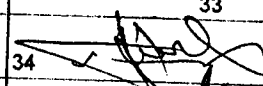
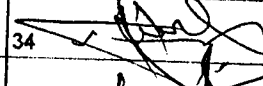
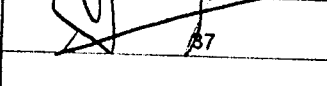
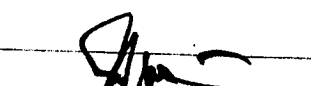
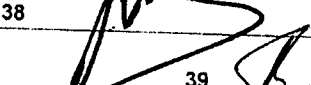
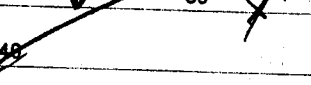
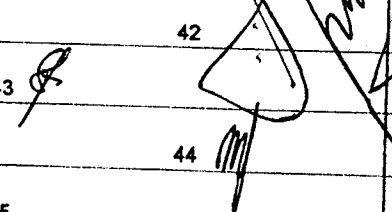
**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan
Raperda APBD Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun
Anggaran 2018;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2017
Tentang Persetujuan Penetapan Raperda APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN VI : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan
Raperda APBD Tahun Anggaran 2018;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor : 900 / 20 / 2017 tentang
Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD
Kabupaten Rembang tentang Raperda APBD
Tahun Anggaran 2018.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : KAMIS, 30 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd. M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	

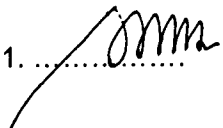
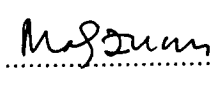
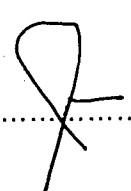
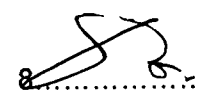
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

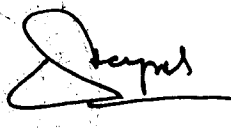
DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : KAMIS, 30 NOVEMBER 2017

PUKUL : 10.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	MAYOR H. HARIYANTO	Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

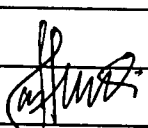
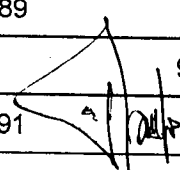
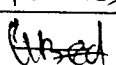
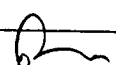


Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

HARI/TANGGAL : KAMIS, 30 NOVEMBER 2017
PUKUL : 10.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI	1. Fajri		4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Nov Effendi		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Machos		8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Kusni	Kasy	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Mukhammad H.	Subang Monev	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laksono	Kesri	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Sugiyarti	Ka Bong.	14
15	BAG. UMUM	Endang		15
16	BPPKAD	Musyri	Kabem	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Ah Sahid		18
19	DINSOSP2KB	Tri Wahjuni	Kepda	19
20	B K D			20
21	B P B D	Anjani	Sek	21
22	DPU TATA RUANG	Sekretaris	Kor	22
23	DPKP/ DINPERKIM	Pesriani		23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo	Sekret	24
25	DINDIKPORA	Marki	Kepda	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Aleksandra	Ko dis	26
27	DINTANPAN	Cipto. L	kebidan	27
28	DINLUTKAN	Budi Yono	Sekretaris	28

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dusi Purwanto	Kadus	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mangun	Subti	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Setiawan	Ra	36
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	PURWANTO	Kadus, Keom.	38
39	SATPOL PP	WALUYO		39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64

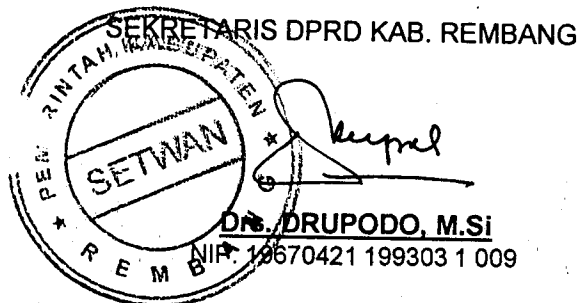
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90
91	POLRES	MARJUK	Bakhter	91 
92		Umar	San	92 
93	Primer Sefda	Dhimas	-	93 
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 30 NOVEMBER 2017

PUKUL : 10.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Eddy Kuswanto	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOLIH	2
3	CAMAT SUMBER	KAM. DAN I	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Juharts	10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Rachmans	14



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**



TENTANG

**PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
APBD KABUPATEN REMBANG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G**

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ;
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

9. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/2472/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Pengiriman Raperda;
10. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 17 November 2017 yang mengagendakan Penjadwalan pembahasan Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Paripurna I dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2017
Jam : 10. 30 WIB
Tempat : Ruang Paripurna
Acara : Penjelasan Bupati Atas Raperda tentang APBD Tahun 2018.

- b. Rapat Paripurna II dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2017
Jam : 13. 00 WIB
Tempat : Ruang Paripurna
Acara : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda tentang APBD Tahun 2018.

- c. Rapat Paripurna III dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2017
Jam : 10. 30 WIB
Tempat : Ruang Paripurna
Acara : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun 2018.

- d. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 21 November 2017 Jam 13.00 WIB dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda APBD Tahun 2018.

- e. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi – komisi DPRD

Hari : Rabu – Jum'at
Tanggal : 22 sampai dengan 24 November 2017
Jam : 10.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Pendalaman Raperda tentang APBD Tahun 2018.

g. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2017
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi - komisi kepada Banggar atas hasil pendalaman Raperda tentang APBD Tahun 2018.

h. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2017
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Membahas Laporan Komisi-komisi atas pendalaman Raperda tentang APBD Tahun 2018.

i. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 November 2017
Jam : 10.30 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2018.

IV. HASIL RAPAT :

Badan Anggaran DPRD telah melakukan pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dengan jadwal yang telah

HASIL PEMBAHASAN
RINGKASAN RANCANGAN APBD INDUK 2018

NO	SKPD	PEMBAHASAN		
		RANCANGAN APBD 2018	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3
1	PENDAPATAN DAERAH	1,777,121,343,655	1,787,223,593,655	10,102,250,000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	271,502,204,655	280,604,454,655	9,102,250,000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	94,514,000,000	96,286,250,000	1,772,250,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,928,499,000	23,158,499,000	230,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,257,000,000	9,257,000,000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144,802,705,655	151,902,705,655	7,100,000,000
1.2	Dana Perimbangan	1,097,531,488,000	1,097,531,488,000	-
1.2.2	Dana Transfer Umum	815,321,417,000	815,321,417,000	-
1.2.3	Dana Transfer Khusus	282,210,071,000	282,210,071,000	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	408,087,651,000	409,087,651,000	1,000,000,000
1.3.1	Pendapatan Hibah	57,432,800,000	58,432,800,000	1,000,000,000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	95,000,000,000	95,000,000,000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228,728,361,000	228,728,361,000	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26,926,490,000	26,926,490,000	-
2.	BELANJA DAERAH	1,869,225,723,684	1,888,834,208,384	19,608,484,700
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,078,343,599,500	1,080,582,799,500	2,239,200,000
2.1.1	Belanja Pegawai	668,770,123,000	668,770,123,000	-
2.1.4	Belanja Hibah	56,510,600,000	58,159,800,000	1,649,200,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,935,000,000	9,855,000,000	920,000,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	6,455,961,000	6,455,961,000	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	336,671,915,500	336,341,915,500	(330,000,000)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	-
2.2	Belanja Langsung	790,882,124,184	808,251,408,884	17,369,284,700
2.2.1	Belanja Pegawai	149,543,818,200	149,840,034,200	296,216,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260,079,241,634	267,302,595,634	7,223,354,000
2.2.3	Belanja Modal	381,259,064,350	391,108,779,050	9,849,714,700
	Jumlah Belanja	1,869,225,723,684	1,888,834,208,384	19,608,484,700
	surplus (devisit)	(92,104,380,029)	(101,610,614,729)	(9,506,234,700)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	93,104,380,029	103,649,694,649	10,545,314,620
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	93,104,380,029	103,610,614,729	10,506,234,700
	Kelebihan Penetapan Pajak Air PDAM	-	39,079,920	39,079,920
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	93,104,380,029	103,649,694,649	10,545,314,620
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	2,039,079,920	1,039,079,920
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000
	Restitusi atas Kelebihan Penetapan Pajak air	-	39,079,920	39,079,920

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD 2018

NO.	SKPD	RANCANGAN APBD 2018			
		PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2		3	4	5=3+4
1	DINPENDIKPORA	-	405,342,322,000	129,382,300,000	534,724,622,000
2	DINAS KESEHATAN	42,919,634,184	45,964,678,000	79,143,993,184	125,108,671,184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	91,000,000,000	25,412,002,000	120,600,000,000	146,012,002,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000	8,964,504,000	180,929,166,000	189,893,670,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000	4,689,576,000	23,135,580,000	27,825,156,000
6	SATPOL PP	-	5,729,062,000	4,977,468,000	10,706,530,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,301,059,000	1,814,000,000	3,115,059,000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2,792,175,000	2,791,000,000	5,583,175,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	9,161,346,000	14,054,790,000	23,216,136,000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	4,595,123,000	2,910,000,000	7,505,123,000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000	12,010,896,000	36,953,000,000	48,963,896,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000	8,388,615,000	12,842,028,000	21,230,643,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,431,727,000	3,294,591,000	6,726,318,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,291,484,000	2,834,485,000	6,125,969,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,382,674,500	5,275,941,000	20,698,165,000	25,974,106,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	356,745,000	2,528,340,000	2,262,000,000	4,790,340,000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,032,000,000	2,560,450,000	5,405,000,000	7,965,450,000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,722,739,000	1,269,000,000	3,991,739,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,886,728,265	4,670,535,000	25,327,200,000	29,997,735,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3,637,277,765	10,319,738,000	25,080,000,000	35,399,738,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	19,873,323,000	-	19,873,323,000
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	766,070,000	-	766,070,000
23	SETDA	9,392,000,000	14,880,000,000	28,299,640,000	43,179,640,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	11,376,200,000	11,376,200,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	475,000,000	475,000,000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90,000,000	14,880,000,000	7,597,000,000	22,477,000,000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000	-	2,604,000,000	2,604,000,000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	1,880,000,000	1,880,000,000
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	1,290,000,000	1,290,000,000
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	9,257,000,000	-	2,042,440,000	2,042,440,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1,035,000,000	1,035,000,000
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,693,016,000	28,501,491,000	33,194,507,000
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,706,455,000	3,517,050,000	9,223,505,000
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,455,650,000	489,962,000	2,945,612,000
27	KECAMATAN SULANG	-	2,196,662,000	831,000,000	3,027,662,000
28	KECAMATAN SUMBER	-	2,046,293,000	698,000,000	2,744,293,000
29	KECAMATAN BULU	-	1,987,136,000	505,060,000	2,492,196,000
30	KECAMATAN LASEM	-	2,313,411,000	501,260,000	2,814,671,000
31	KECAMATAN PANCUR	-	2,260,226,000	512,500,000	2,772,726,000
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,512,355,000	537,600,000	2,049,955,000
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,819,768,000	915,000,000	2,734,768,000
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,846,545,000	529,300,000	2,375,845,000
35	KECAMATAN SALE	-	1,876,938,000	640,100,000	2,517,038,000
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,161,309,000	837,170,000	2,998,479,000
37	KECAMATAN SEDAN	-	2,063,375,000	580,025,000	2,643,400,000
38	KECAMATAN SARANG	-	2,547,229,000	744,700,000	3,291,929,000
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	3,975,163,000	5,414,000,000	9,389,163,000
40	BAPPEDA	-	3,925,044,000	4,550,000,000	8,475,044,000
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,612,127,748,941	424,489,518,500	12,450,500,000	13,496,127,267,441

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD 2018

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2		6	7	8=6+7
1	DINPENDIKPORA	-	405,342,322,000	141,216,592,700	546,558,914,700
2	DINAS KESEHATAN	42,919,634,184	45,964,678,000	79,443,993,184	125,408,671,184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	97,000,000,000	25,412,002,000	126,600,000,000	152,012,002,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000	8,964,504,000	178,599,370,000	187,563,874,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000	4,689,576,000	20,243,018,000	24,932,594,000
6	SATPOL PP	-	5,763,862,000	4,977,468,000	10,741,330,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	1,301,059,000	1,814,000,000	3,115,059,000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2,792,175,000	3,361,000,000	6,153,175,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	9,161,346,000	13,844,790,000	23,006,136,000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	20,750,000	4,595,123,000	2,660,000,000	7,255,123,000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,535,000	12,704,496,000	38,103,000,000	50,807,496,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000	8,388,615,000	12,612,028,000	21,000,643,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3,431,727,000	3,254,591,000	6,686,318,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	3,291,484,000	2,949,485,000	6,240,969,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,361,924,500	5,275,941,000	20,398,165,000	25,674,106,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	356,745,000	2,528,340,000	2,262,000,000	4,790,340,000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,032,000,000	2,560,450,000	5,345,000,000	7,905,450,000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	2,722,739,000	1,699,000,000	4,421,739,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,216,728,265	4,542,135,000	25,577,200,000	30,119,335,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3,637,277,765	10,353,338,000	25,280,000,000	35,633,338,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	19,873,323,000	-	19,873,323,000
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	766,070,000	-	766,070,000
23	SETDA	9,392,000,000	14,880,000,000	28,814,640,000	43,694,640,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	11,326,200,000	11,326,200,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	475,000,000	475,000,000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	90,000,000	14,880,000,000	7,597,000,000	22,477,000,000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000	-	2,514,000,000	2,514,000,000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	1,880,000,000	1,880,000,000
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	1,220,000,000	1,220,000,000
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	9,257,000,000	-	2,792,440,000	2,792,440,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	1,010,000,000	1,010,000,000
24	SEKRETARIAT DPRD	-	4,693,016,000	30,291,591,000	34,984,607,000
25	KECAMATAN REMBANG	-	5,706,455,000	3,517,050,000	9,223,505,000
26	KECAMATAN KALIORI	-	2,467,650,000	489,962,000	2,957,612,000
27	KECAMATAN SULANG	-	2,196,662,000	831,000,000	3,027,662,000
28	KECAMATAN SUMBER	-	2,046,293,000	698,000,000	2,744,293,000
29	KECAMATAN BULU	-	2,038,736,000	505,060,000	2,543,796,000
30	KECAMATAN LASEM	-	2,313,411,000	651,260,000	2,964,671,000
31	KECAMATAN PANCUR	-	2,260,226,000	512,500,000	2,772,726,000
32	KECAMATAN SLUKE	-	1,512,355,000	537,600,000	2,049,955,000
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	1,819,768,000	915,000,000	2,734,768,000
34	KECAMATAN GUNEM	-	1,846,545,000	529,300,000	2,375,845,000
35	KECAMATAN SALE	-	1,876,938,000	670,100,000	2,547,038,000
36	KECAMATAN KRAGAN	-	2,161,309,000	837,170,000	2,998,479,000
37	KECAMATAN SEDAN	-	2,063,375,000	580,025,000	2,643,400,000
38	KECAMATAN SARANG	-	2,547,229,000	744,700,000	3,291,929,000
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	3,975,163,000	5,414,000,000	9,389,163,000
40	BAPPEDA	-	3,937,044,000	4,525,000,000	8,462,044,000
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,614,899,998,941	426,019,518,500	12,722,750,000	438,742,268,500

REKAPITULASI
ANGGARAN BELANJA SKPD RAPBD 2018

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2		9=6-3	10=7-4	11=9+10
1	DINPENDIKPORA	-	-	11,834,292,700	11,834,292,700
2	DINAS KESEHATAN	-	-	300,000,000	300,000,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	6,000,000,000	-	6,000,000,000	6,000,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	(2,329,796,000)	(2,329,796,000)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	(2,892,562,000)	(2,892,562,000)
6	SATPOL PP	-	34,800,000	-	34,800,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	570,000,000	570,000,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	(210,000,000)	(210,000,000)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	20,750,000	-	(250,000,000)	(250,000,000)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	693,600,000	1,150,000,000	1,843,600,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	(230,000,000)	(230,000,000)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	(40,000,000)	(40,000,000)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	115,000,000	115,000,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	(20,750,000)	-	(300,000,000)	(300,000,000)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	(60,000,000)	(60,000,000)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	430,000,000	430,000,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	330,000,000	(128,400,000)	250,000,000	121,600,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-	33,600,000	200,000,000	233,600,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	515,000,000	515,000,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	(50,000,000)	(50,000,000)
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	(90,000,000)	(90,000,000)
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	(70,000,000)	(70,000,000)
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	750,000,000	750,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	(25,000,000)	(25,000,000)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	1,790,100,000	1,790,100,000
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	-	12,000,000	-	12,000,000
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	-	51,600,000	-	51,600,000
30	KECAMATAN LASEM	-	-	150,000,000	150,000,000
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	30,000,000	30,000,000
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	-	-	-	-
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
40	BAPPEDA	-	12,000,000	(25,000,000)	(13,000,000)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2,772,250,000	1,530,000,000	272,250,000	1,802,250,000

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	JUMLAH				
		RANCANGAN APBD 2018				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
		3	4	5	6	7=+3+4+5+6
1	DINAS KESEHATAN		292,600,000		42,627,034,184	42,919,634,184
2	RSU R. SOETRASNO				91,000,000,000	91,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1,000,000,000		20,000,000	1,020,000,000
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1,115,000,000			1,115,000,000
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121,535,000			121,535,000
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		130,000,000			130,000,000
7	DINAS PERHUBUNGAN		1,382,674,500			1,382,674,500
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		356,745,000			356,745,000
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1,032,000,000			1,032,000,000
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12,707,919,265		178,809,000	12,886,728,265
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		3,635,010,000		2,267,765	3,637,277,765
12	SEKRETARIAT DAERAH	-	135,000,000	9,257,000,000	-	9,392,000,000
	Bag. Umum		90,000,000			90,000,000
	Bag. Administrasi Perekonomian			9,257,000,000		9,257,000,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas		45,000,000			45,000,000
13	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	94,514,000,000	1,020,015,235		10,974,594,706	106,508,609,941
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA					-
	JUMLAH	94,514,000,000	22,928,499,000	9,257,000,000	144,802,705,655	271,502,204,655

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PER SKPD

NO	SKPD	PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH				
		PEMBAHASAN				
		PERSETUJUAN				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
1	2	8	9	10	11	12=8+9+10+11
1	DINAS KESEHATAN		292,600,000		42,627,034,184	42,919,634,184
2	RSU R. SOETRASNO				97,000,000,000	97,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1,000,000,000		20,000,000	1,020,000,000
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1,115,000,000			1,115,000,000
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		121,535,000			121,535,000
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		130,000,000			130,000,000
7	DINAS PERHUBUNGAN		1,361,924,500			1,361,924,500
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		356,745,000			356,745,000
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1,032,000,000			1,032,000,000
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		12,937,919,265		278,809,000	13,216,728,265
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM		3,635,010,000		2,267,765	3,637,277,765
12	SEKRETARIAT DAERAH	-	135,000,000	9,257,000,000	-	9,392,000,000
	Bag. Umum		90,000,000			90,000,000
	Bag. Administrasi Perekonomian			9,257,000,000		9,257,000,000
	Bag. Kesejahteraan Rakyat					-
	Bag. Humas		45,000,000			45,000,000
13	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	96,286,250,000	1,020,015,235		11,974,594,706	109,280,859,941
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		20,750,000			20,750,000
	JUMLAH	96,286,250,000	23,158,499,000	9,257,000,000	151,902,705,655	280,604,454,655

REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
 PER SKPD

NO	SKPD	PEMBAHASAN				
		BERTAMBAH(BERKURANG)				
		Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	JUMLAH
		13=8-3	14=9-4	15=10-5	16=11-6	17=13+14+15+16
1	2					
1	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
2	RSU R. SOETRASNO	-	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
7	DINAS PERHUBUNGAN	-	(20,750,000)	-	-	(20,750,000)
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-
9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	230,000,000	-	100,000,000	330,000,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	-	-	-	-	-
12	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
	Bag. Umum	-	-	-	-	-
	Bag. Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-
	Bag. Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
	Bag. Humas	-	-	-	-	-
13	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	1,772,250,000	-	-	1,000,000,000	2,772,250,000
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	20,750,000	-	-	20,750,000
	JUMLAH	1,772,250,000	230,000,000	-	7,100,000,000	9,102,250,000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PEMBAHASAN	
		RANCANGAN APBD 2018	PERSETUJUAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1.20.1.20.05.00.00.4	PENDAPATAN	1,505,619,139,000	1,506,619,139,000	1,000,000,000
1.20.1.20.05.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	1,097,531,488,000	1,097,531,488,000	-
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2	Dana Transfer Umum	815,321,417,000	815,321,417,000	-
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3	Dana Transfer Khusus	282,210,071,000	282,210,071,000	-
1.20.1.20.05.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	408,087,651,000	409,087,651,000	1,000,000,000
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	57,432,800,000	58,432,800,000	1,000,000,000
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95,000,000,000	95,000,000,000	-
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228,728,361,000	228,728,361,000	-
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26,926,490,000	26,926,490,000	-
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA	409,573,476,500	411,812,676,500	2,239,200,000
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	409,573,476,500	411,812,676,500	2,239,200,000
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	56,510,600,000	58,159,800,000	1,649,200,000
	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	450,000,000	460,000,000	10,000,000
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25,000,000	25,000,000	-
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	175,000,000	255,000,000	80,000,000
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,231,000,000	1,466,000,000	235,000,000
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	120,000,000	120,000,000	-
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8,348,000,000	8,593,000,000	245,000,000
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2,330,000,000	3,990,000,000	1,660,000,000
	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	19,620,000,000	20,150,000,000	530,000,000
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,505,000,000	1,555,000,000	50,000,000
	DINPENDIKPORA	21,286,600,000	20,115,800,000	(1,170,800,000)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	500,000,000	500,000,000	-
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	70,000,000	80,000,000	10,000,000
	DINAS KESEHATAN	850,000,000	850,000,000	-
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,935,000,000	9,855,000,000	920,000,000
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7,585,000,000	8,505,000,000	920,000,000
	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	250,000,000	250,000,000	-
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	1,100,000,000	1,100,000,000	-
1.20.1.20.05.00.00.5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6,455,961,000	6,455,961,000	-
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,455,961,000	6,455,961,000	-
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	336,671,915,500	336,341,915,500	(330,000,000)
	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	224,500,000	224,500,000	-
	DINAS KESEHATAN	1,090,956,000	1,090,956,000	-
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2,500,000,000	2,500,000,000	-
		332,856,459,500	332,526,459,500	(330,000,000)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	1,096,045,662,500	1,094,806,462,500	(1,239,200,000)
1.20.1.20.05.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.20.1.20.05.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	93,104,380,029	103,649,694,649	10,545,314,620

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	JUMLAH (Rp)							
		RANCANGAN APBD 2018							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	405,342,322,000							405,342,322,000
2	DINAS KESEHATAN	45,964,678,000							45,964,678,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	25,412,002,000							25,412,002,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,964,504,000							8,964,504,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,689,576,000							4,689,576,000
6	SATPOL PP	5,729,062,000							5,729,062,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,301,059,000							1,301,059,000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,792,175,000							2,792,175,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9,161,346,000							9,161,346,000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,595,123,000							4,595,123,000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,010,896,000							12,010,896,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,388,615,000							8,388,615,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,431,727,000							3,431,727,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,291,484,000							3,291,484,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,275,941,000							5,275,941,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,528,340,000							2,528,340,000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,560,450,000							2,560,450,000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,722,739,000							2,722,739,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,670,535,000							4,670,535,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,319,738,000							10,319,738,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,873,323,000							19,873,323,000
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	766,070,000							766,070,000
23	SETDA	14,880,000,000							14,880,000,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	14,880,000,000							14,880,000,000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
24	SEKRETARIAT DPRD	4,693,016,000							4,693,016,000
25	KECAMATAN REMBANG	5,706,455,000							5,706,455,000
26	KECAMATAN KALIORI	2,455,650,000							2,455,650,000
27	KECAMATAN SULANG	2,196,662,000							2,196,662,000
28	KECAMATAN SUMBER	2,046,293,000							2,046,293,000
29	KECAMATAN BULU	1,987,136,000							1,987,136,000
30	KECAMATAN LASEM	2,313,411,000							2,313,411,000
31	KECAMATAN PANCUR	2,280,226,000							2,280,226,000
32	KECAMATAN SLUKE	1,512,355,000							1,512,355,000
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,819,768,000							1,819,768,000
34	KECAMATAN GUNEM	1,846,545,000							1,846,545,000
35	KECAMATAN SALE	1,876,938,000							1,876,938,000
36	KECAMATAN KRAGAN	2,161,309,000							2,161,309,000

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN PERSETUJUAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18 = 11+12+13+14+15+16+17
1	DINPENDIKPORA	405,342,322,000							405,342,322,000
2	DINAS KESEHATAN	45,964,678,000							45,964,678,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	25,412,002,000							25,412,002,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8,964,504,000							8,964,504,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4,689,576,000							4,689,576,000
6	SATPOL PP	5,763,862,000							5,763,862,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,301,059,000							1,301,059,000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,792,175,000							2,792,175,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9,161,346,000							9,161,346,000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	4,595,123,000							4,595,123,000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,704,496,000							12,704,496,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,388,615,000							8,388,615,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,431,727,000							3,431,727,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,291,484,000							3,291,484,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,275,941,000							5,275,941,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,528,340,000							2,528,340,000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,560,450,000							2,560,450,000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,722,739,000							2,722,739,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,542,135,000							4,542,135,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	10,353,338,000							10,353,338,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	19,873,323,000							19,873,323,000
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	766,070,000							766,070,000
23	SETDA	14,880,000,000							14,880,000,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)								-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)								-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	14,880,000,000							14,880,000,000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)								-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)								-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)								-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)								-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)								-
24	SEKRETARIAT DPRD	4,693,016,000							4,693,016,000
25	KECAMATAN REMBANG	5,706,455,000							5,706,455,000
26	KECAMATAN KALIORI	2,467,650,000							2,467,650,000
27	KECAMATAN SULANG	2,196,662,000							2,196,662,000
28	KECAMATAN SUMBER	2,046,293,000							2,046,293,000
29	KECAMATAN BULU	2,038,736,000							2,038,736,000
30	KECAMATAN LASEM	2,313,411,000							2,313,411,000
31	KECAMATAN PANCUR	2,260,226,000							2,260,226,000
32	KECAMATAN SLUKE	1,512,355,000							1,512,355,000
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,819,768,000							1,819,768,000
34	KECAMATAN GUNEM	1,846,545,000							1,846,545,000
35	KECAMATAN SALE	1,876,938,000							1,876,938,000
36	KECAMATAN KRAGAN	2,161,309,000							2,161,309,000
37	KECAMATAN SEDAN								-

REKAPITULASI
BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	HASIL PEMBAHASAN							
		BERTAMBAH (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	19 = 11-3	20 = 12-4	21 = 13-5	22 = 14-6	23 = 15-7	24 = 16-8	25 = 17-9	26=19+20+21+22+23+24+25
1	DINPENDIKPORA	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	34,800,000	-	-	-	-	-	-	34,800,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	693,600,000	-	-	-	-	-	-	693,600,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(128,400,000)	-	-	-	-	-	-	(128,400,000)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	33,600,000	-	-	-	-	-	-	33,600,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SETDA	-	-	-	-	-	-	-	-
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	-	-	-	-	-	-	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KECAMATAN REMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KECAMATAN KALIORI	12,000,000	-	-	-	-	-	-	12,000,000
27	KECAMATAN SULANG	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KECAMATAN SUMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KECAMATAN BULU	51,600,000	-	-	-	-	-	-	51,600,000
30	KECAMATAN LASEM	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN SLUKE	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN GUNEM	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SALE	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	RANCANGAN APBD 2018			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	DINPENDIKPORA	22,818,412,000	46,920,336,000	59,643,552,000	129,382,300,000
2	DINAS KESEHATAN	25,709,089,200	32,331,601,984	21,103,302,000	79,143,993,184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	43,937,151,000	37,232,849,000	39,430,000,000	120,600,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,863,971,000	3,033,770,150	175,031,424,850	180,929,166,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,206,430,000	3,993,720,000	17,935,430,000	23,135,580,000
6	SATPOL PP	2,271,958,000	1,690,634,000	1,014,876,000	4,977,468,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,207,010,000	606,990,000	-	1,814,000,000
8	BAUAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	751,700,000	1,576,300,000	463,000,000	2,791,000,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	3,039,974,000	10,239,516,000	775,300,000	14,054,790,000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	806,180,000	2,009,620,000	94,200,000	2,910,000,000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,874,258,000	34,051,702,000	1,027,040,000	36,953,000,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,997,276,000	3,187,157,000	7,657,595,000	12,842,028,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,906,076,000	1,279,665,000	108,850,000	3,294,591,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	613,445,000	2,147,450,000	73,590,000	2,834,485,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,765,440,000	10,200,725,000	8,732,000,000	20,698,165,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	702,905,000	1,191,935,000	367,160,000	2,262,000,000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	852,155,000	2,886,240,500	1,666,604,500	5,405,000,000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	427,150,000	766,262,000	75,588,000	1,269,000,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,849,160,000	2,571,415,000	18,906,625,000	25,327,200,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,738,661,000	2,744,964,000	20,596,375,000	25,080,000,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	12,225,040,000	14,265,475,000	1,809,125,000	28,299,640,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	8,033,150,000	3,097,750,000	245,300,000	11,376,200,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	107,950,000	354,200,000	12,850,000	475,000,000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1,442,410,000	4,871,090,000	1,283,500,000	7,597,000,000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	710,900,000	1,792,200,000	100,900,000	2,604,000,000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	710,400,000	1,169,600,000	-	1,880,000,000
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	821,350,000	465,525,000	3,125,000	1,290,000,000
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	159,430,000	1,883,010,000	-	2,042,440,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	239,450,000	632,100,000	163,450,000	1,035,000,000
24	SEKRETARIAT DPRD	2,872,978,000	24,865,183,000	763,330,000	28,501,491,000
25	KECAMATAN REMBANG	1,029,155,000	871,005,000	1,616,890,000	3,517,050,000
26	KECAMATAN KALIORI	195,896,000	271,066,000	23,000,000	489,962,000
27	KECAMATAN SULANG	231,944,000	369,306,000	229,750,000	831,000,000
28	KECAMATAN SUMBER	131,205,000	377,795,000	189,000,000	698,000,000
29	KECAMATAN BULU	280,550,000	203,510,000	21,000,000	505,060,000
30	KECAMATAN LASEM	113,760,000	387,500,000	-	501,260,000
31	KECAMATAN PANCUR	124,808,000	360,692,000	27,000,000	512,500,000
32	KECAMATAN SLUKE	210,985,000	279,615,000	47,000,000	537,600,000
33	KECAMATAN PAMOTAN	259,865,000	616,135,000	39,000,000	915,000,000
34	KECAMATAN GUNEM	113,730,000	257,770,000	157,800,000	529,300,000
35	KECAMATAN SALE	287,360,000	246,040,000	106,700,000	640,100,000
36	KECAMATAN KRAGAN	200,929,000	440,791,000	195,450,000	837,170,000
37	KECAMATAN SEDAN	377,040,000	197,185,000	5,800,000	580,025,000
38	KECAMATAN GABANG	122,612,000	227,612,000	-	350,224,000

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9
1	DINPENDIKPORA	22,618,399,000	48,977,541,000	69,620,652,700	141,216,592,700
2	DINAS KESEHATAN	25,752,539,200	32,423,151,984	21,268,302,000	79,443,993,184
3	RSUD dr R. SOETRASNO	43,937,151,000	41,232,849,000	41,430,000,000	126,600,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,862,935,000	3,034,806,150	172,701,628,850	178,599,370,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,206,830,000	1,326,383,000	17,709,805,000	20,243,018,000
6	SATPOL PP	2,271,958,000	1,690,634,000	1,014,876,000	4,977,468,000
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,207,010,000	606,990,000	-	1,814,000,000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	726,780,000	1,826,220,000	808,000,000	3,361,000,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,998,749,000	10,105,741,000	740,300,000	13,844,790,000
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	685,510,000	1,896,290,000	78,200,000	2,660,000,000
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,359,558,000	35,408,752,000	1,334,690,000	38,103,000,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,737,116,000	3,300,942,000	7,573,970,000	12,612,028,000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,890,676,000	1,255,065,000	108,850,000	3,254,591,000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	613,445,000	2,262,450,000	73,590,000	2,949,485,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,763,965,000	10,172,200,000	8,462,000,000	20,398,165,000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	702,905,000	1,191,935,000	367,160,000	2,262,000,000
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	874,155,000	2,804,240,500	1,666,604,500	5,345,000,000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	452,950,000	1,000,862,000	245,188,000	1,699,000,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,851,420,000	2,919,155,000	18,806,625,000	25,577,200,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,730,161,000	2,932,789,000	20,617,050,000	25,280,000,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	12,374,005,000	14,808,660,000	1,631,975,000	28,814,640,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	8,033,150,000	3,047,750,000	245,300,000	11,326,200,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	107,950,000	354,200,000	12,850,000	475,000,000
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	1,442,410,000	4,871,090,000	1,283,500,000	7,597,000,000
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	710,900,000	1,793,600,000	9,500,000	2,514,000,000
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	634,125,000	1,245,875,000	-	1,880,000,000
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	755,350,000	461,525,000	3,125,000	1,220,000,000
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	210,670,000	2,561,770,000	20,000,000	2,792,440,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	479,450,000	472,850,000	57,700,000	1,010,000,000
24	SEKRETARIAT DPRD	2,870,728,000	26,640,648,000	780,215,000	30,291,591,000
25	KECAMATAN REMBANG	1,029,155,000	871,005,000	1,616,890,000	3,517,050,000
26	KECAMATAN KALIORI	207,236,000	263,726,000	19,000,000	489,962,000
27	KECAMATAN SULANG	250,444,000	350,806,000	229,750,000	831,000,000
28	KECAMATAN SUMBER	155,205,000	348,795,000	194,000,000	698,000,000
29	KECAMATAN BULU	281,550,000	202,510,000	21,000,000	505,060,000
30	KECAMATAN LASEM	189,110,000	312,150,000	150,000,000	651,260,000
31	KECAMATAN PANCUR	185,708,000	299,792,000	27,000,000	512,500,000
32	KECAMATAN SLUKE	246,035,000	252,565,000	39,000,000	537,600,000
33	KECAMATAN PAMOTAN	252,825,000	623,175,000	39,000,000	915,000,000
34	KECAMATAN GUNEM	187,020,000	264,480,000	77,800,000	529,300,000
35	KECAMATAN SALE	287,360,000	271,040,000	111,700,000	670,100,000
36	KECAMATAN KRAGAN	200,929,000	440,791,000	195,450,000	837,170,000
37	KECAMATAN SEDAN	344,940,000	198,285,000	36,800,000	580,025,000
38	KECAMATAN SARANG	188,040,000	263,660,000	293,000,000	744,700,000

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11 = 7 - 3	12 = 8 - 4	13 = 9 - 5	14 = 11+12+13
1	DINPENDIKPORA	(200,013,000)	2,057,205,000	9,977,100,700	11,834,292,700
2	DINAS KESEHATAN	43,450,000	91,550,000	165,000,000	300,000,000
3	RSUD dr R. SOETRASNO	-	4,000,000,000	2,000,000,000	6,000,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(1,036,000)	1,036,000	(2,329,796,000)	(2,329,796,000)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	400,000	(2,667,337,000)	(225,625,000)	(2,892,562,000)
6	SATPOL PP	-	-	-	-
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(24,920,000)	249,920,000	345,000,000	570,000,000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(41,225,000)	(133,775,000)	(35,000,000)	(210,000,000)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(120,670,000)	(113,330,000)	(16,000,000)	(250,000,000)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(514,700,000)	1,357,050,000	307,650,000	1,150,000,000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(260,160,000)	113,785,000	(83,625,000)	(230,000,000)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(15,400,000)	(24,600,000)	-	(40,000,000)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	115,000,000	-	115,000,000
15	DINAS PERHUBUNGAN	(1,475,000)	(28,525,000)	(270,000,000)	(300,000,000)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	22,000,000	(82,000,000)	-	(60,000,000)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	25,800,000	234,600,000	169,600,000	430,000,000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,260,000	347,740,000	(100,000,000)	250,000,000
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(8,500,000)	187,825,000	20,675,000	200,000,000
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SETDA	148,965,000	543,185,000	(177,150,000)	515,000,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	-	(50,000,000)	-	(50,000,000)
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)	-	-	-	-
c	SETDA (BAGIAN UMUM)	-	-	-	-
d	SETDA (BAGIAN HUMAS)	-	-	-	-
e	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)	(76,275,000)	1,400,000	(91,400,000)	(90,000,000)
f	SETDA (BAGIAN HUKUM)	(66,000,000)	76,275,000	-	-
g	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	51,240,000	(4,000,000)	-	(70,000,000)
h	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)	240,000,000	678,760,000	20,000,000	750,000,000
24	SEKRETARIAT DPRD	(2,250,000)	(159,250,000)	(105,750,000)	(25,000,000)
25	KECAMATAN REMBANG	-	1,775,465,000	16,885,000	1,790,100,000
26	KECAMATAN KALIORI	11,340,000	-	-	-
27	KECAMATAN SULANG	18,500,000	(7,340,000)	(4,000,000)	-
28	KECAMATAN SUMBER	24,000,000	(18,500,000)	-	-
29	KECAMATAN BULU	24,000,000	(29,000,000)	5,000,000	-
30	KECAMATAN LASEM	1,000,000	(1,000,000)	-	-
31	KECAMATAN PANCUR	75,350,000	(75,350,000)	150,000,000	150,000,000
32	KECAMATAN SLUKE	60,900,000	(60,900,000)	-	-
33	KECAMATAN PAMOTAN	35,050,000	(27,050,000)	(8,000,000)	-
34	KECAMATAN GUNEM	(7,040,000)	7,040,000	-	-
35	KECAMATAN SALE	73,290,000	6,710,000	(80,000,000)	-
36	KECAMATAN KRAGAN	-	25,000,000	5,000,000	30,000,000
37	KECAMATAN SEDAN	-	-	-	-
38	KECAMATAN SARANG	(32,100,000)	1,100,000	31,000,000	-

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan guna Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 November 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN**

Ketua,

Sekretaris

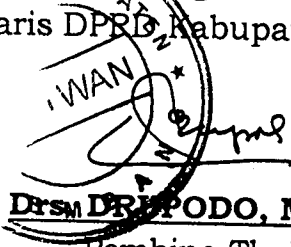
ttd

ttd

H. MAJID KAMIL MZ

Drs. DRUPODO, M. Si.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

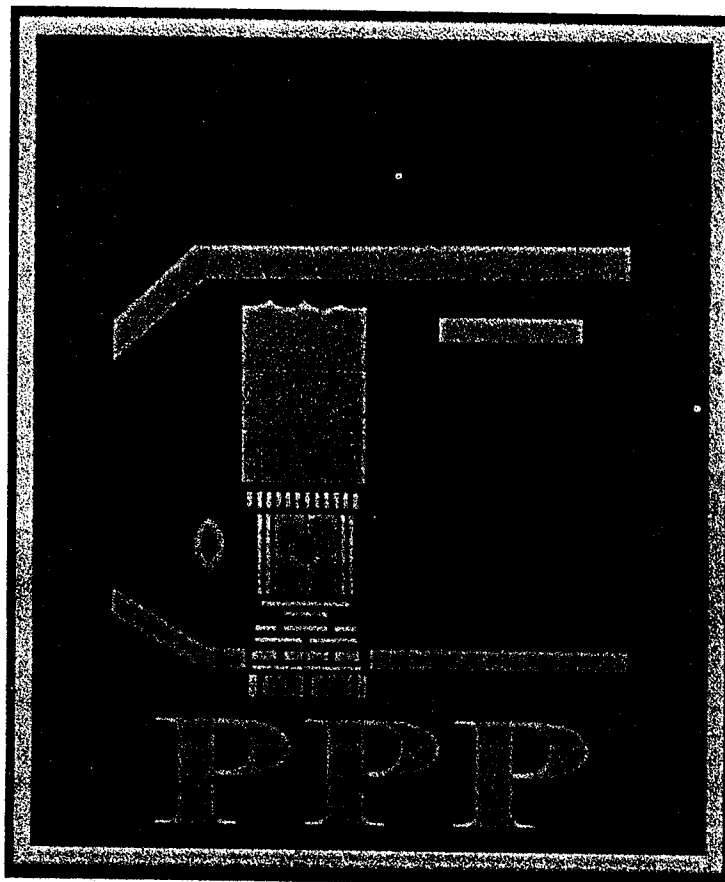
The image shows a circular official stamp of the DPRD Kabupaten Rembang. Inside the stamp, the word 'DEWAS' is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. DRUPODO, M. Si.

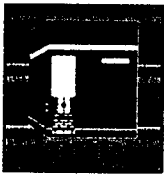
Pembina Tk. I

NIP. 19670421 199303 1 009

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2018



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2018

Kamis , 30 Nopember 2017

Dibacakan oleh : Henry Purwoko , SPd

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

*Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulilla., Wa'alaa alihi wasohbihi
wamawwalah., laahaula wala quwwata illabillah..., Amma ba'da.....*

Yang kami hormati :

- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan , Kepala Dinas , Kepala Kantor , Kepala Bagian Setda , dan Para Camat di lingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD ini , dalam keadaan sehat Wal afiat, tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW , dan para shahabat , beserta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat akhir kami, terhadap Rancangan Perda, tentang APBD Kabupaten Rembang tahun 2018 , terlebih dahulu kami mengucapkan selamat hari Guru pada tanggal 25 Nopember 2017 karena ditangan beliau para guru inilah yang akan mencetak pemimpin – pemimpin bangsa ini kedepan. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Pejabat- pejabat baru yang telah dilantik kemarin, semoga beliau-beliau benar-benar amanah dan mampu bekerja lebih baik dan profesional sehingga visi-misi bupati dan wakil bupati benar-benar bisa terwujud. setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati , dalam rapat paripurna ke III , pada hari Selasa , tanggal 21 Nopember 2017 , terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi , dan selanjutnya dilakukan pembahasan melalui rapat-rapat di Komisi , bersama dengan OPD terakait , Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi , serta Rapat Banggar dengan TAPD , Alkhamdulillah semua dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan .

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

menerima dan menyetujui , RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ini , dijadikan PERDA , Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 , dengan segala perubahan dan pergeseran yang ada , di dalam pembahasannya.

Di dalam Pendapat akhir ini , ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan , sebagai usulan dan masukan , antara lain sebagai berikut :

1. Mencermati pengantar nota keuangan RAPBD 2018 yang disampaikan oleh Saudara Bupati pada Tanggal 20 nopember 2017, Yang bertemakan penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju kemandirian daerah, kami berharap arah kebijakan pemkab, terhadap pembangunan pariwisata lebih diperkuat, karena kami melihat banyak potensi wisata di kabupaten Rembang yang belum tergarap dengan baik karena lahan kepemilikan yang belum jelas dan sistem kerja sama antara desa dan pemkab. Yang belum jelas padahal potensi yang ada di Rembang bisa untuk meningkatkan pendapatan daerah yang signifikan dan pendapatan masyarakat dengan multi player efek yang ditimbulkan dari pembangunan wisata, untuk itu kami mengusulkan beberapa hal yang perlu dilakukan :
 - a. Memprioritaskan pembuatan Riparda daerah karena ini merupakan ruh pembangunan pariwisata dan juga amanat undang- undang
 - b. Memperkuat sumber daya manusia yang ada di Dinas pariwisata dengan tenaga-tenaga yang potensial dan mempunyai keahlian di bidang pariwisata .
 - c. Mengidentifikasi potensi-potensi wisata yang ada di Rembang, yang bisa di garap menjadi potensi wisata unggulan, dengan segala permasalahannya untuk segera ditindaklanjuti dengan kebijakkan yang tepat. contohnya banyak potensi wisata di daerah Rembang yang tanahnya milik perhutani dalam hal ini kita dapat membangun kerjasama dengan perhutani, untuk mengelola potensi wisata bersama, dan segera bentuk kerjasama pengelolaan antara pemkab. dan desa bagi obyek wisata yang status tanahnya menjadi milik desa. Agar dalam pengelolaannya tidak parsial dan memiliki arah yang jelas kalau pemkab. menjadi ujung tombaknya.
2. Berkaitan dengan Pilkades serentak di kabupaten Rembang tahun 2017, sebanyak 8 (delapan) desa, yang besuk hari Rabu , tanggal 06 Desember 2017 akan dilaksanakan, menurut pantauan kami, sejak dari penjadwalan tahapan kegiatan sampai dengan saat ini, secara umum masih kondusif , dan kita berharap, semoga semua dapat berjalan dengan lancar, aman , damai dan sukses. Meskipun demikian , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon

3. Sesuai hasil rapat di tingkat Komisi bersama OPD , dalam pembahasan disepakati bahwa, program kegiatan yang tercantum didalam Rancangan APBD tahun 2018 ini, adalah prioritas kegiatan yang 95 % dapat dilaksanakan . Maka sehubungan dengan hal tersebut , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada Pemkab , supaya komitmen yang sudah disepakati ini benar-benar dilaksanakan dan ini menjadi tolak ukur bagi Pemkab. untuk menilai kinerja masing-masing OPD. Tentunya sistem reward dan punishment juga disesuaikan dengan penilaian kinerja tersebut.
4. Berkaitan dengan jumlah personil tenaga teknik , di OPD DPU Taru dan Dinperkim, juga di Satpol PP, yang masih sangat minim, dibanding beban kerja yang ada, maka sehubungan dengan hal tersebut, agar rasio tenaga dan beban kerja seimbang, kami dari F-PPP mengusulkan agar pada OPD tersebut dapat ditambah tenaga kerjanya , sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.
5. Dalam rangka percepatan peningkatan Pendapatan Daerah, mengingat kedepan akan semakin berkembang industri di Rembang, dan untuk penanganan pendapatan dari sumber pajak dan retribusi daerah, serta untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dibidang pengelolaan pendapatn daerah , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mohon, kepada Pemkab Rembang , agar Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang dipisahkan dengan BPPKAD dan dibentuk OPD sendiri berbentuk Badan. Kami juga meminta Pemkab.melakukan trobosan dalam menaikan pendapatan tentunya trobasan-trobasan tersebut jangan memberatkan masyarakat dan juga kedepan dalam meningkatkan PAD, tidak memprioritaskan sektor tambang karena biaya recovery yang dibutuhkan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Misalnya kita dapat seperti Surakarta yang pendapatan daerahnya ditopang oleh sektor wisata baik wisata budaya, wisata alam alam dan kulinernya. Kami yakin wisata alam Rembang, lebih indah dari pada Surakarta dan juga wisata budayanya tidak kalah dengan Surakarta.
6. Tentang ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, kami dari FPPP mengapresiasi yang banyak membangun pasar-pasar tradisional dan memodernisasi pasar tradisional menjadi lebih indah dan nyaman agar mampu bersaing terhadap pasar modern yang banyak tumbuh di Rembang. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari saudara Bupati untuk melindungi pedagang kecil dan tradisional agar tetap mampu bersaing dengan pengusaha besar. Tetapi dalam hukum dagang persaingan yang kompetitif akan tetap berlaku, dan kami menyadari Pemkab. tidak bisa intervensi terlalu jauh terhadap hukum dagang yang berlaku , Pemkab. hanya bisa intervensi dengan kebijakan, untuk itu kami mohon dalam menerbitkan ijin ijin toko modern atau swalayan harus benar benar hati-hati

Terkait dengan ekonomi kreatif, kami F.PPP melihat banyak anak-anak muda kita yang mampu berinovasi menciptakan produk-produk baru yang karyanya diminati pasar saat ini, dari bahan baku yang banyak tersedia di Rembang yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik seperti produk herbal asli Lasem yang mampu menembus pasaran Jakarta, sabun etawa dari Sulang, batik dari Bulu, kripik cacing dari Ngadem, kerajinan tas dari Sumber dan lain-lain.

Kalau ini digarap dengan baik akan mampu menumbuhkan ekonomi sekitar dan membuka tenaga kerja baru bahkan mengangkat citra Rembang di luar daerah.

Kami F.PPP meminta OPD yang terkait mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Rembang dan melakukan pembinaan secara serius, membantu promosi dan memfasilitasi untuk menyiapkan pemasarannya, bukan hanya sekedar memberikan pelatihan-pelatihan tanpa diikuti pembinaan setelah pelatihan.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 ini, Semoga apa yang kita rencanakan dapat berhasil dan bermanfaat, untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul Muwaffiq Illaa aqwamitthoorik

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

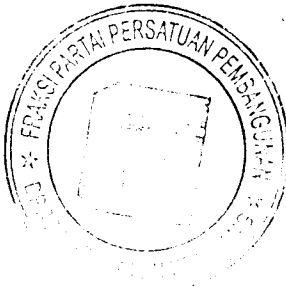
Rembang , 30 Nopember 2017

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO

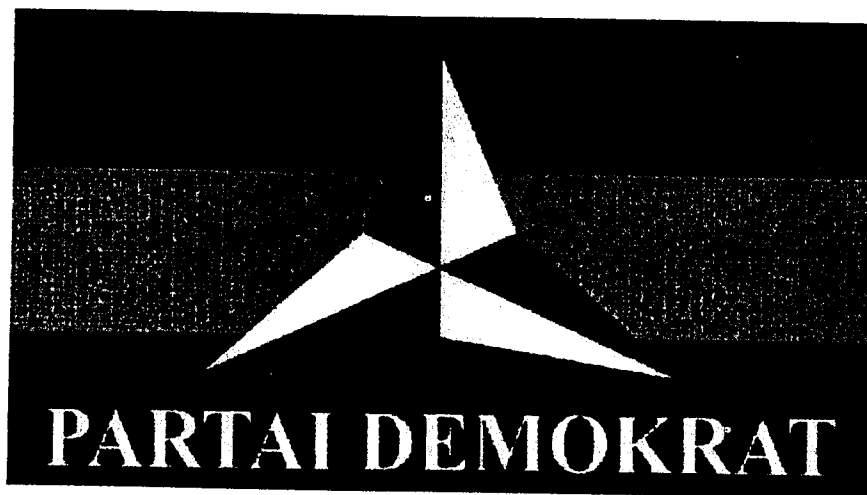


SEKRETARIS

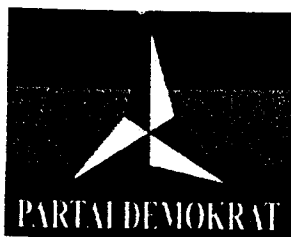


ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

FRAKSI DEMOKRAT

**Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

KAMIS, 30 NOVEMBER 2017

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahNya sehingga pada saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmatNya.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Terima kasih kepada Saudara Pimpinan yang memberikan kesempatan kepada Fraksi Demokrat untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi atas hasil pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2018.

Syukur alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 mulai dari penyampaian, pembahasan ditingkat komisi, banggar berjalan dengan baik dan lancar sehingga Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiimi Kami Fraksi Demokrat **Menyetujui** RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi PERDA APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk ditindak lanjuti, antara lain :

1. Kami Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya dalam perencanaan anggaran, konsultan harus cermat dan teliti, supaya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dalam pengawasannya perlu di tingkatkan.
2. Sesuai visi misi Bupati dalam RPJMD bahwa target jalan tanpa lubang di kabupaten Rembang, akan tetapi belum di imbangi dengan anggaran yang cukup besar.
3. Mohon perhitungan dana perimbangan yang matang dan selalu

4. Mohon PEMKAB kedepan dalam menyampaikan KUAPPAS / RAPBD tidak selalu mepet sehingga tidak optimal dalam pembahasannya.
5. Mohon SK Bupati terkait aset jalan / jembatan di Kabupaten harus mengakomodir semua jalan poros desa dan jalan-jalan desa yang volumenya sangat besar yang tidak mampu dikerjakan desa.
6. Mohon Perhatian Bupati dan terutama Kabag Hukum bahwa pengiriman Raperda non APBD pasti di akhir tahun padahal propemperda sudah ditetapkan setahun sebelumnya
Apa masalahnya !!!.
7. Dengan kenaikan TPP yang signifikan, Kami Fraksi Demokrat berharap :
 - a. Agar bisa meningkatkan kinerja ASN secara profesional dan proporsional.
 - b. Meningkatkan pendapatan asli daerah dan menggali potensi-potensi yang bisa menjadikan embrio-embrio pendapatan pada sektor-sektor yang ada di Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan; Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Rembang, 30 November 2017

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



EKA SISWA KARTIKA



SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN
2018**

disampaikan oleh.....

Assalamualaikum, wr.wb.

Yang terhormat Saudara Bupati dan wakil Bupati Rembang

Yang terhormat Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang;

Yang terhormat Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat Para Pejabat dilingkungan Pemkab Rembang serta Para Camat Se-Kabupaten Rembang

Yang terhormat Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kab. Rembang dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN TAHUN ANGGARAN 2018 dalam Keadaan Sehat Wal'afiat.

Sidang Paripurna yang kami hormati.

Demi menghasilkan sebuah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 yang berkualitas dan benar-benar berpihak kepada masyarakat, DPRD Kabupaten Rembang dan Pemerintah Daerah telah menjalani masa rapat dalam rangka membahas Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Keseluruhan rangkaian rapat yang telah diselenggarakan, dilaksanakan dalam bingkai semangat kemitraan dan persaudaraan. Kesungguhan DPRD dan seluruh jajaran eksekutif selama masa-masa rapat ditunjukkan melalui diskusi yang cukup mendalam dan sungguh melelahkan, diskusi yang serius dengan mengungkapkan gagasan-gagasan kritis-konstruktif, baik dalam rapat kerja komisi, maupun dalam rapat Badan Anggaran. Oleh karena itu FPKB menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan telah menunjukkan komitmen kemitraan selama masa rapat ini.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang atas hasil pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, FPKB memandang perlu untuk memberikan catatan sebagai berikut :

1. Seluruh hasil pembahasan termasuk beberapa pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018, FPKB berharap agar semua OPD sebagai pengelola anggaran dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2018 hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas dan disiplin anggaran yang tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai apa yang telah direncanakan dan disepakati dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Program-program dan kegiatan-kegiatan di tiap OPD agar kedepan direncanakan lebih matang dari sisi kemanfaatan, anggaran dan teknis pelaksanaan agar program dan kegiatan tersebut betul-betul berkualitas, bermanfaat, afektif dan efisien.
3. Terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pagu yang besar agar Pemerintah melakukan proses tender sesegera mungkin, sehingga pelaksanaan proyek fisik/konstruksi dapat dijalankan maksimal pertengahan tahun anggaran. Dengan ini, diharapkan pemerintah dapat terus melakukan pengawasan yang intensif terhadap para rekanan pelaksana untuk menjaga kualitas pekerjaan proyek, dan proyek dapat diselesaikan tepat pada waktunya. FPKB menegaskan agar di tahun 2018 nanti, tidak ada lagi kegagalan pelaksanaan proyek infrastruktur/fisik karena alasan “waktu yang terbatas”.
4. OPD-OPD yang mempunyai kegiatan pembangunan infrastruktur atau proyek fisik dengan pagu yang besar terutama DPU agar lebih hati-hati, teliti dan cermat dalam perencanaan. RAB dan

cuaca atau alasan lain yang tidak jelas. Hal ini penting, karena terhambatnya penyelesaian proyek fisik juga menghambat pembangunan Daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Beberapa catatan yang telah kami sampaikan tersebut sekaligus merupakan rekomendasi kepada pemerintah dan selanjutnya Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat MENERIMA dan MENYETUJUI Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018.

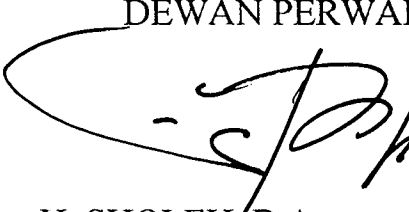
Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya .

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamittorieq

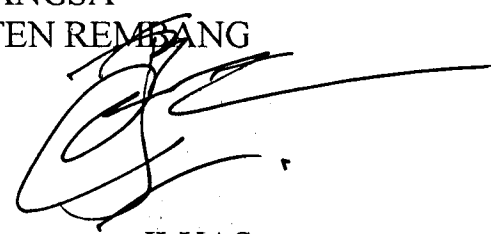
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

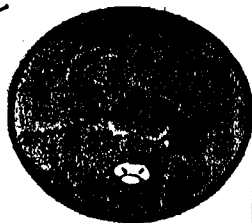
Rembang, 30 November 2017

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN REMBANG


H. SHOLEH, B.A
WakilKetua




ILYAS
sekretaris



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Tanggal : 30 Nopember 2017

TENTANG : RAPERDA APBD 2018

Dibacakan Oleh : Nanik Sri Sundari

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi.....MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab.
Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab.
Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf,

Dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), rekan Wartawan, Ormas dan semua

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia,

Sebagai pembukaan dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi ini kami terlebih dahulu mengucapkan yang pertama selamat hari ulang tahun PGRI yang ke – 72 yang jatuh pada tanggal 25 nopember 2017, semoga PGRI semakin bisa mengemban amanah kedepannya, yang kedua Selamat Hari ulang tahun yang ke - 46 bagi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang jatuh pada tanggal 29 Nopember kemarin, semoga KORPRI semakin berdedikasi dalam mengemban tugas-tugasnya dan semakin professional dalam melayani masyarakat, dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan jatuh pada hari jum'at tanggal 1 desember 2017 besok, semoga kita bisa mengingat dan meneladani suri tauladan Nabi kita Muhammad SAW.

Setelah melewati tahapan – tahapan dalam rangka pembahasan Raperda APBD tahun 2018, yang melalui rapat komisi beserta OPD terkait ,dan setelah semua masuk dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan bahwa hari ini dengan agenda Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2018, kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem telah menyusun Pendapat Akhir Fraksi, adapun poin – poin yang akan kami sampaikan diantaranya :

1. Kami fraksi PDI perjuangan Nasdem berharap kepada sdr Bupati agar ditahun

2. Kami Fraksi PDI perjuangan Nasdem berharap kepada semua OPD dalam perencanaan anggaran agar lebih teliti supaya tidak ada lagi ada kegiatan di OPD yang Urgents tapi ternyata tidak tersedia anggarannya, menurut kami ini sangat kami sayangkan.
3. Kami fraksi PDI perjuangan Nasdem berharap setiap OPD untuk tahun ke depan lebih inovatif dan kreatif lagi dalam penyusunan kegiatan supaya tidak terkesan monoton dari tahun ke tahun. Setiap OPD bisa bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang lebih maksimal minimal 90 %. Dan segera memverifikasi kegiatan hibah dan Bansos agar bisa berjalan di awal tahun anggaran.
4. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mengingat, pentingnya pengelolaan Badan Pendapatan Daerah agar bisa berdiri sendiri untuk mampu mewujudkan sebagai organisasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat. sehingga dapat menciptakan iklim masyarakat yang taat pajak dan tertib retribusi daerah, supaya peraturan daerah dan aturan pelaksanaan yang berpedoman mampu mengoptimalkan potensi dari segala sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat Kab. Rembang.

Itulah beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam rangka sebagai masukan bagi Pemkab dalam menyusun Raperda APBD tahun 2018 semoga bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat Rembang pada khususnya.

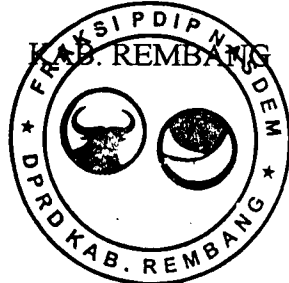
HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem yang telah kami sampaikan terhadap Raperda APBD tahun 2018. Dan dengan mengucapkan “Bismillahirrohmannirrohim....Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menyetujui Raperda APBD ini untuk disetujui menjadi Perda APBD tahun 2018“. kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya. Terima kasih.....

Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamu alaikum wr. Wb.

Salam Restorasi.....MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



AN/KETUA

WIDODO

SEKRETARIS

ALTIRCHAM, ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

**RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018**

PARTAI



**GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA**

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 30 November 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat NYA yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Setelah melalui berbagai tahapan dalam pembahasan Rencana APBD Kabupaten Rembang Tahun 2018, dalam Rapat Komisi-Komisi, Rapat Banggar - TAPD, Rapat Banggar- Pimpinan Komisi dan Rapat Fraksi, maka kami sampaikan catatan penting sebagai berikut :

- Dengan bertambahnya Belanja Daerah yang mencapai angka 1,878 Trilyun

secara maksimal dalam kurun waktu 1 tahun kedepan. Kami berharap untuk kegiatan-kegiatan yang Anggaranya cukup besar dan harus dilelang agar didahulukan pelaksanaannya agar memperoleh waktu yang cukup. Kita buktikan bahwa Penyerapan Anggaran sesuai dengan *Scedule* yang telah ditetapkan secara Tri Wulan, agar grafiknya bisa linier dan tidak *Mbendol Mburi*. Kita buktikan bahwa semua unsur Pemerintahan yang ada di Kabupaten Rembang bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga laju Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang bisa berjalan lancar dan normal, Penyerapan Anggaran juga berjalan baik serta masyarakat bisa menikmati dampak dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraanya. Kami, Fraksi Gerindra Tidak ingin bahwa kejadian di Tahun ini terulang kembali, dimana untuk Pekerjaan yang Anggarannya besar sampai saat ini masih belum selesai. Ada yang Kontraknya selesai tanggal 22 Desember ini, seperti trotoar rembang, ada yang selesai tanggal 25 Desember 2017 seperti pekerjaan Gedung Olah Raga, bahkan ada yang belum adanya kontrak baru seperti Pasar Sale, karena persoalan tertentu. Kenapa kita harus bermain-main di waktu *injury time*, padahal waktu yang sediakan cukup panjang, yaitu 1 Tahun, sehingga pekerjaan tersebut rawan tidak selesai serta rawan terhadap kualitas dan kuantitasnya karena pada akhir tahun cuacanya adalah musim penghujan.

- Pada dasarnya pengelolaan APBD itu didasarkan pada 3 kepentingan yaitu untuk Penyelenggara Pemerintahan, untuk Pelayanan Masyarakat dan untuk Pembangunan Infrastruktur. Kami Fraksi Gerindra masih Prihatin terhadap beberapa Pos Kegiatan / Program yang hanya dianggarkan 6 Bulan. Hal ini akan berdampak terhadap keberhasilan sebuah kegiatan tersebut. Seperti pada Dinas Kesehatan, Program Kesehatan masyarakat untuk kegiatan penyediaan Pembiayaan dan jaminan Kesehatan (JKRS) cuma teranggarkan 2,01 M, padahal kebutuhan seharusnya adalah 5,2 M. Kami khawatir akan terjadi Masalah yang berkepanjangan, karena orang sakit tidak bisa di Prediksi,

Kabupaten bisa memberikan Kesehatan Gratis bagi masyarakat Kabupaten Rembang yang membutuhkan, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Rembang.

- Selain itu pada Dinas Pendidikan untuk Kegiatan UNBK hanya tersedia anggaran 60 persen dari total anggaran yang dibutuhkan yaitu sekitar 8 M. Meskipun itu Program Nasional, bukan berarti anggaran juga dari APBN, tetapi tetap ada kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendukung Programnya maupun Anggarannya. Fraksi Gerindra khawatir juga, Program ini tidak Sukses, karena ketersediaan Komputer yang belum mencukupi apadiah Waktu Pelaksanaan UNBK sekitar bulan Juni – Juli, apa mungkin kita menganggarkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan yang biasa dibahas pada bulan September. Kalau implementasi dilapangan carut marut, maka akan mempengaruhi kualitas nilai dari siswa tersebut dan ini akan berdampak pada nama Kabupaten Rembang dimata Nasional. Kami memahami bahwa para Pendidik sudah membuat strategi agar peralatan komputer bisa mencukupi untuk semua siswa dengan sistem Ujian bergelombang dalam 1 hari bahkan ada yang sampai 3 gelombang, yaitu waktu pagi, siang dan sore secara bergantian. Kalau masih saja kurang peralatan Komputernya, maka pasti biaya ini akan dibebankan kepada orang tua murid. Semoga menjadi refleksi kita kedepan.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Perda. Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua.

Billahitaufiq wal hidaayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 30 Nopember 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS PEMBAHASAN RAPERDA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TA. 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Kamis Wage, 30 Nopember 2017

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

Ingkang kinormatan,

- Sedherek Bupati saha Wakil Bupati Rembang.
- Sedherek Pimpinan saha sedaya Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Sedherek Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Sedherek Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala OPD (organisasi perangkat daerah), Kepala Bagian Setda ugi sedherek Camat ing tlatah Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Sarta para rawuh ingkang minulya.

Sedaya puja lan puji konjuk ing ngarsa Dalem Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring rohmah saha berkah, mugu-mugu kita tansah pinaringan kesehatan lan kawilujengan saged ngayahi kuwajiban ngawula dhateng masyarakat Rembang.

Ing kalodhangan menika kepareng Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang ngaturaken “Sugeng Dinten Dwija utawi Hari Guru” ingkang kaping 72 (pitung ndasa kalih) dhawah tanggal 25 Nopember, ugi ngaturaken “Sugeng Ambal Warsa KORPRI” ingkang kaping 46 tanggal 29 Nopember kepengker. Kita angajab mugu para dwija saged anggulawenthah para siswa dados putra-putri ingkang lantip ing pikir, lembah ing manah saha luhur ing budi pakarti; dene katur KORPRI utawi para pegawai negeri mugu pangabdian panjenengan mbeta manfaat kangge bangsa lan negara.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi bersama SKPD terkait dan dilanjutkan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD, maka saatnya kami menyampaikan Pendapat Fraksi Karya Sejahtera atas Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2018 sbb.

- Dengan pengalaman APBD TA 2017 dimana terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun yang tidak bisa terlaksana secara maksimal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Fraksi Karya Sejahtera mengharapkan agar APBD TA 2018 nanti dilaksanakan secara optimal sehingga tidak menyisakan SILPA yang besar agar bisa memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Rembang.
- Mengingat pentingnya PAD (pendapatan asli daerah) sebagai “darah segar” dalam pembangunan daerah serta merupakan faktor dalam menentukan kemampuan keuangan daerah, maka Fraksi Karya Sejahtera mengusulkan hal-hal sbb
 1. Dibentuk OPD (organisasi perangkat daerah) tersendiri terpisah dari BPPKAD yang mengelola pendapatan asli daerah, sebagai organisasi yang lebih efektif dan efisien yang mengelola pendapatan daerah agar mampu mewujudkan visi dan misi pendapatan daerah.
 2. Menyusun SOP (standard operasional prosedur) dalam pemungutan pajak
 3. Penegakan Perda tentang Pajak dan Reribusi Daerah oleh SATPOL PP lebih digalakkan

Demikian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera, dan kami menyetujui Raperda APBD Kabupaten Rembang TA 2018 ini untuk ditetapkan menjadi Perda APBD Kabupaten Rembang TA 2018.

Pangarsaning parepatan saha para rawuh sedaya.

Sakderengipun lengser saking mimbar menika, kepareng ngaturaken piweling para sepuh mekaten, “*Bener iku dadi rebutane wong akeh, nanging carane nggayuh akeh kang disangkani saka tumindak sing ora bener, rumangsane gelis kecandhak. Saupama panggayuhe mau disangkani saka panggawe bener lan becik, kira-kira mesthi dadi becik salawas-lawase, sanadyan suwe kecandhake*”.

Mbok bilih wonten atur ingkang mboten mranani ing seratan punika, kawula nyuwun gunging samodra pangaksami. Mugi-mugi Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos tansah paring rohmah lan berkah ing ndalem ngayahi damel ambangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - Wassalamu’alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI



Sekretaris,

JOKO SUPRIHADI, SH

PENGANTAR:

Berdasar Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomer: 430/0525 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, yang isinya seluruh jajaran SKPD Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Walikota se-Jawa Tengah serta pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah bahwa setiap hari Kamis supaya bertutur menggunakan bahasa Jawa.

Maka pada hari ini Kemis Wage, tanggal 11 Maulud 1951 (tahun Jawa) kami menyampaikan pemandangan fraksi dalam bahasa Jawa. Namun hanya bagian pembuka dan penutup saja yang kami sampaikan dalam Bahasa Jawa, sedang pada bagian inti kami menggunakan “cara mlayu” atau Bahasa Indonesia agar semua kalangan bisa memahaminya.

Sumangga.

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT FRAKSI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Dibacakan Oleh : ~~SUGARMIN~~

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Raperda APBD T.A 2018 dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Tahun 2018 dicanangkan sebagai tahun “Penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif menuju Kemandirian Daerah”. Terkait dengan kebijakan tersebut, kami mengharapkan penjelasan detil tentang penjabaran dari kebijakan tersebut, mengingat rancangan kegiatan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 tidak tercantum anggaran kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor dominan dalam pengembangan ekonomi.

Kami mengharapkan penjelasan, apakah di tahun 2018 pemerintah kabupaten Rembang akan melakukan rekrutmen PNS dan apakah sudah dicadangkan pembiayaannya.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Supaya lebih optimal, dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar dapat dipersiapkan lebih awal. Demikianlah pendapat fraksi dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda APBD T.A 2018 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

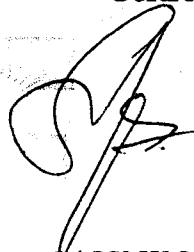
Rembang, 30 November 2017

**FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG**

Ketua

SUKARMAIN

Sekretaris



SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018
Tanggal, 30 November 2017**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala OPD se-
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur **Alhamdulillah** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna terakhir DPRD, dalam rangka "**Pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018**" dalam keadaan sehat wala'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini iijinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas ketepatan waktu dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Tujuan utama Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 adalah Memperkuat Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah untuk Pengembangan Potensi Wilayah, serta pemenuhan Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Perwujudan Pemerintahan yang Amanah.

Secara berkelanjutan RAPBD ini mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Adapun ringkasan RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.787.223.593.655,- (*Satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), Belanja Daerah sebesar Rp.1.888.834.208.384,- (*Satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), defisit sebesar Rp. 101.610.614.729,- (*Seratus satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*) dan ditutup dengan Pembiayaan sebesar Rp. 101.610.614.729,- (*Seratus satu milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh*

ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga postur RAPBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

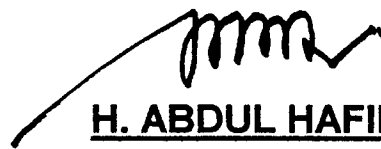
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 yang telah kita bahas dan setuju bersama semoga mampu memenuhi harapan serta cita-cita luhur yang telah kita harapkan bersama.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Semoga amal ibadah saudara dan kita semua mendapat imbalan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Amin.

Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by several loops and a final checkmark-like stroke.

H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Membaca : Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang diperlukan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Restribusi Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah / Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
40. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
44. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

- Memperhatikan:
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2017.
 2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2017.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 November 2017.

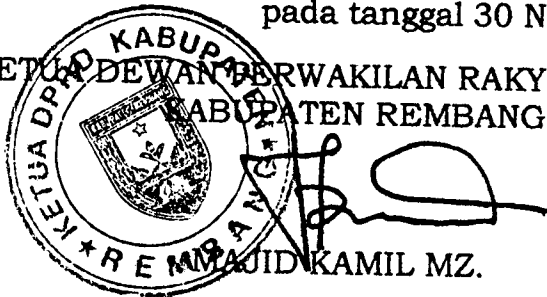
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 November 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MUJID KAMIL MZ.



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 20 / 2017

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada Hari ini ***Kamis tanggal Tiga Puluh*** bulan Nopember ***Dua Ribu Tujuh Belas*** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 90 Rembang yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
2. **MAJID KAMIL** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
3. **GUNASIH** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. **M. BISRI CHOLIL LAQUF** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. **SUMARSIH** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

(RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 30 November 2017

BUPATI REMBANG


ABDUL HAFIDZ



**KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


MAJID KAMIL. MZ.
**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

GUNASIH

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**


M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

